

ASIAN 2006
DECENT WORK
DECADE 2015



Organisasi
Perburuhan
Internasional

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2011

Mempromosikan pertumbuhan lapangan kerja di tingkat provinsi



Kantor ILO di Indonesia

Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2011

Mempromosikan pertumbuhan lapangan kerja di tingkat provinsi

Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: pubdroit@ilo.org. International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: info@copyright.com] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

ISBN 978-92-2-026157-6 (print)
978-92-2-826158-5 (web pdf)

ILO

Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2011: Mempromosikan pertumbuhan lapangan kerja di tingkat provinsi/ Kantor Perburuhan Internasional – Jakarta: ILO, 2012
viii, 66 p

Juga tersedia dalam bahasa Inggris: *Labour and social trends in Indonesia 2011: Promoting job-rich growth in provinces*, ISBN 978-92-2-026157-6 (print); 978-92-2-126158-2 (web pdf)/International Labour Office – Jakarta: ILO, 2012
vi, 58 p.

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggungjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Office atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: pubvente@ilo.org
Kunjungi halaman web kami: www.ilo.org/publns

Kata pengantar

Persoalan keempat dari *Tren sosial dan ketenagakerjaan di Indonesia* difokuskan pada lapangan kerja di tingkat provinsi. Indonesia telah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif selama satu dekade terakhir dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut dengan tingkat ekspansi ekonomi yang semakin cepat. Di sini tampak jelas bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat cerah di masa mendatang. Laporan tahun lalu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi diwujudkan dalam bentuk penciptaan lapangan kerja sebagai tema utama karena pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak menjamin adanya pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja.

Tahun ini kami mengalihkan perhatian ke daerah-daerah. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih 17.000 pulau di wilayah geografis yang sangat luas. Situasi ini membuat Indonesia kaya akan keragaman budaya, makanan, agama dan bahasa daerah. Perlu diakui bahwa saya sangat menikmati perjalanan menjelajahi negeri yang indah ini. Sewaktu di perjalanan, saya menemukan perbedaan yang sangat besar dalam hal kondisi sosio-ekonomi dari satu daerah ke daerah lain. Terlintas di benak saya bahwa secara alami, kebijakan ketenagakerjaan perlu berbeda tergantung kondisi provinsi masing-masing (*lain lubuk, lain belalang*). Di samping itu, tidak ada satu solusi kebijakan yang “cocok untuk semua” atau satu ‘sarana’ tunggal yang mampu mempercepat penciptaan lapangan kerja, kendati ada sejumlah kesamaan dalam hal respons kebijakan terhadap persoalan yang sama di antara satu daerah dengan daerah lain.

Di samping perbedaan kondisi sosio-ekonomi, Indonesia mempunyai struktur tata pemerintahan yang terdesentralisir. Oleh karena itu, kita perlu memberi perhatian ekstra ke daerah-daerah. Kendati para pembuat kebijakan di tingkat nasional tetap memainkan peran penting dalam membuat rancangan pembangunan dan menyediakan panduan untuk daerah, namun para pembuat kebijakan di tingkat daerah perlu menganalisis persoalan-persoalan yang dihadapi daerah mereka serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai agar dapat mengatasi persoalan tersebut. Secara umum, faktor keberhasilan penting dalam organisasi yang terdesentralisir adalah kapasitas untuk menyelesaikan masalah di tingkat daerah. Kebijakan ini berlaku di Indonesia.

ILO di Indonesia tengah bekerja sama dengan para pembuat kebijakan dan mitra sosial lokal. Kami telah bekerja di enam provinsi untuk mengembangkan keterampilan. Proyek lain yang menangani masalah migrasi dan pekerja rumah tangga (PRT) telah melaksanakan beberapa program di daerah asal. Proyek teknis berbasis di kantor pusat telah menyusun metode analisis diagnostik ketenagakerjaan di tiga provinsi di Indonesia. Keterlibatan kami di daerah-daerah telah menghasilkan pengetahuan dan pelajaran penting untuk disebarluaskan serta model kebijakan/program untuk ditiru secara luas

di provinsi-provinsi lain. Kami akan terus menjalin kerjasama dengan mitra kami di tingkat nasional maupun daerah.

Laporan ini disusun oleh Kazutoshi Chatani, Ekonom Kantor ILO Jakarta. Ia pernah bekerja di bagian Analisis Ekonomi dan Pasar Tenaga Kerja di kantor pusat ILO sebelum ditugaskan di Indonesia. Laporan ini menerima masukan penting dari para kolega di kantor ILO Jakarta maupun Unit Analisis Ekonomi dan Sosial Regional di Kantor Regional ILO untuk Asia Pasifik.

Harapan kami laporan ini dapat menghasilkan diskusi dan memberi kontribusi terkait pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja tingkat provinsi. Dalam kesempatan ini, kami ingin menegaskan kembali komitmen kami untuk bekerja sama dengan para konstituen di Indonesia dengan memanfaatkan keahlian teknis kami melalui proyek-proyek kerjasama teknis agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan banyak lapangan kerja serta memberi manfaat bagi semua warga dengan semangat *“bersama kita bisa”*.

Peter van Rooij

Direktur

Kantor ILO Jakarta

Daftar akronim dan istilah dalam bahasa Indonesia

APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
ASEAN	Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
EDA	Analisis Diagnostik Ketenagakerjaan
PDB	Produk Domestik Bruto
PDBR	Produk domestik bruto regional
ILO	Organisasi Perburuhan Internasional
KILM	Indikator Utama Pasar Tenaga Kerja
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
MP3EI	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MDG	Tujuan Pembangunan Milenium
Kemenakertrans	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
OECD	Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
PKH	Program Keluarga Harapan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Rp.	Rupiah
SIYB	Memulai dan Meningkatkan Usaha Anda
UKM	Usaha Kecil Menengah
Sukernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional

Catatan:

Laporan ini menggunakan nilai tukar: 1 USD=Rp. 9,000

Ejaan dalam bahasa Inggris untuk Jawa adalah dengan huruf ‘v’, sedangkan ejaan bahasa Indonesia menggunakan huruf ‘w’, Jawa. Dalam mengacu nama-nama provinsi di pulau Jawa, laporan ini menggunakan ejaan bahasa Indonesia (misalnya Jawa Timur).

Daftar Isi

Kata pengantar	iii
Daftar akronim dan istilah dalam bahasa Indonesia	v
Ringkasan Eksekutif	1
1. Tren ekonomi dan pasar tenaga kerja	7
1.1 Tren ekonomi	7
1.2 Tren pasar tenaga kerja	11
2 Mempromosikan pertumbuhan yang banyak menghasilkan lapangan kerja di daerah	31
2.1 Mengurangi pengangguran melalui pembangunan desa	32
2.2 Inisiatif untuk mempercepat pertumbuhan regional	34
2.3 Mengarusutamakan penciptaan lapangan kerja dalam perencanaan pembangunan daerah	39
2.4 Pembangunan infrastruktur di desa untuk konektivitas yang lebih baik	42
2.5 Perpindahan tenaga kerja dan pemakaian remitan secara produktif	45
2.6 Menghapus hambatan gender untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan	49
2.7 Hak-hak pekerja dan dialog sosial	54
Lampiran I Disagregasi pekerjaan BPS dalam perekonomian formal dan informal	59
Lampiran II Lampiran statistik	60

Daftar Tabel

Tabel 1: Pengeluaran PDB dengan harga pasar konstan	9
Tabel 2: Produk domestik bruto regional (PDBR) berdasarkan harga pasar konstan tahun 2000 menurut provinsi	10
Tabel 3: Rasio pekerjaan dibandingkan penduduk, usia 15-64, %	13
Tabel 4: Pekerjaan informal (usia 15+, %)	14
Tabel 5: Indikator pasar tenaga kerja pilihan menurut provinsi	16
Tabel 6: Pangsa sektor dalam hal pekerjaan (%)	25
Tabel 7: Tingkat inflasi (dari tahun ke tahun, %)	25
Tabel 8: Upah nominal pekerja produksi di sektor manufaktur di bawah tingkat penyelia	25
Tabel 9: Tren waktu dalam tingkat pendaftaran bersih di Indonesia (1994–2010)	27
Tabel 10: Pengeluaran publik untuk pendidikan dan masa belajar	28
Tabel 11: Tema pembangunan dan kegiatan utama menurut koridor ekonomi	36

Tabel 12:	Realisasi investasi menurut provinsi (Rp. trilyun)	37
Tabel 13:	Jumlah bisnis terdaftar per 1.000 warga dan insiden kemiskinan	38
Tabel 14:	Densitas usaha baru (pendaftaran baru per 1.000 penduduk usia 15-64)	39
Tabel 15:	Remitan pekerja migran dari negara tujuan (dalam juta dolar Amerika, 2010)	47
Tabel 16:	Rincian tenaga kerja menurut gender dan status pekerjaan	50
Tabel 17:	Ratifikasi Konvensi Pokok ILO (Negara-negara anggota ASEAN)	55
Tabel 18:	Jumlah pelanggaran atas hak-hak pekerja menurut jenis (%)	57

Daftar Gambar

Gambar 1:	Tingkat pertumbuhan ekonomi (beberapa negara pilihan, %)	7
Gambar 2:	Tingkat pertumbuhan PDB riil (perkiraan)	8
Gambar 3:	Indeks tenaga kerja dan pertumbuhan lapangan kerja (tahun 2000=100)	11
Gambar 4:	Tingkat pengangguran menurut kelompok umur (%)	12
Gambar 5:	Tingkat pengangguran (usia 15+, %)	13
Gambar 6:	Tingkat setengah pengangguran dalam hal waktu (%)	14
Gambar 7:	Pekerjaan informal menurut daerah (usia 15+, persen)	18
Gambar 8:	Ketenagakerjaan, produktivitas tenaga kerja dan kemiskinan (2010)	20
Gambar 9:	Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan tahunan menurut provinsi (2006-2010, %)	21
Gambar 10:	Pangsa pekerja menurut pendidikan dan sektor (2009, %)	23
Gambar 11:	Pekerjaan menurut status ketenagakerjaan (usia 15+, 2010, %)	24
Gambar 12:	Harga pangan dan upah pekerja produksi di sektor manufaktur di bawah tingkat penyelia (%)	26
Gambar 13:	Upah/gaji bersih bulanan pekerja dan upah minimum yang berlaku	27
Gambar 14:	Rasio pendaftaran bersih (2010)	28
Gambar 15:	Tingkat pengangguran menurut area geografis (2005-2010, %)	34
Gambar 16:	Realisasi investasi (Rp. trilyun)	37
Gambar 17:	Pohon diagnostik ketenagakerjaan	41
Gambar 18:	Pendekatan berbasis sumber daya lokal	44
Gambar 19:	Remitan Pekerja migran (dalam juta dolar Amerika, 2010)	46
Gambar 20:	Siklus migrasi yang produktif	48
Gambar 21:	Pangsa perempuan dalam pekerjaan menurut status pekerjaan	50
Gambar 22:	Pemisahan pekerjaan menurut jenis kelamin (usia 15+, persen, 2010)	52



Ringkasan Eksekutif

Laporan ini difokuskan pada pertumbuhan yang menghasilkan banyak lapangan kerja di tingkat provinsi. Tema mendasar dari laporan ini adalah “mempromosikan pertumbuhan yang menghasilkan banyak lapangan kerja di tingkat daerah” yang diambil dari prinsip kebijakan pemerintah sekarang, yaitu pertumbuhan yang “pro pekerjaan dan pro masyarakat miskin”. Dikarenakan kondisi sosio-ekonomi yang sangat berbeda dari satu provinsi ke provinsi lain di Indonesia, mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja yang membutuhkan intervensi kebijakan yang sesuai di tingkat daerah, sesuai tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lapangan kerja di daerah tersebut. Tata pemerintahan Indonesia yang terdesentralisir membutuhkan adanya upaya ekstra untuk menganalisis pasar tenaga kerja di tingkat daerah.

Separuh pertama laporan ini menyoroti kecenderungan atau tren sosio-ekonomi serta kinerja pasar tenaga kerja di tingkat provinsi. Di tingkat nasional, Indonesia telah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi selama satu dekade terakhir, dan lebih mampu menghadapi guncangan krisis keuangan global dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini, dan diperkirakan mampu berkembang lebih cepat dari negara-negara tetangga dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang. Namun jika dilihat lebih dekat, pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di beberapa provinsi memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat berbeda dari satu provinsi ke provinsi lain. Pada faktanya, hampir separuh PDB nasional dihasilkan dari tiga provinsi di pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara provinsi-provinsi di kawasan timur masih jauh tertinggal dari pusat-pusat industri ini dalam menciptakan kemakmuran. Peluang kerja mencerminkan pembangunan ekonomi yang tidak seimbang di negara ini, kecuali jika provinsi memiliki sumber daya alam yang kaya.

Secara keseluruhan, pertumbuhan lapangan kerja kembali pada jalurnya sejak tahun 2006 sebagaimana yang ditunjukkan melalui penurunan tingkat pengangguran setelah mencapai puncaknya tahun 2005. Namun, berbagai tantangan masih tetap ada dalam mencapai tingkat pertumbuhan yang

inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja. Pertama, kalangan muda masih kesulitan memasuki pasar tenaga kerja. Peluang kerja untuk mereka tidak dapat diperluas antara tahun 2000 hingga 2010. Kecenderungan menurun baru-baru ini dalam hal pengangguran di kalangan muda sebagian dikarenakan oleh penurunan partisipasi pekerja muda karena semakin jumlah kaum muda yang mengenyam pendidikan; sehingga tekanan pasar tenaga kerja terhadap kaum muda dapat ditekan hingga ke tingkat tertentu.

Kedua, integrasi perempuan ke dalam pasar tenaga kerja memperlihatkan kemajuan yang tidak terlalu besar kendati pertumbuhan ekonomi terus berlanjut selama satu dekade terakhir dan kesenjangan gender rasio pekerjaan dibandingkan penduduk tetap luas kendati cenderung berkurang. Tampaknya ada beberapa hambatan gender di pasar tenaga kerja, yang mencegah perekonomian Indonesia dalam memanfaatkan secara optimal perempuan berpendidikan yang jumlahnya semakin besar dalam hal permodalan manusia. Ketiga, setengah pengangguran dalam hal waktu menunjukkan kecenderungan sedikit meningkat. Keempat, ekspansi ekonomi yang berkelanjutan selama satu dekade terakhir ini menyebabkan berkurangnya pekerjaan informal.

Keempat tantangan ini membutuhkan adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah dan mitra sosial dalam menciptakan dan menyediakan lapangan kerja yang produktif. Di sini jelas bahwa pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak menjamin pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja serta berbagai intervensi kebijakan dengan cara yang koheren dibutuhkan agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi ke dalam pertumbuhan lapangan kerja yang menguntungkan semua kelompok pekerja.

Kinerja pasar tenaga kerja sangat bervariasi dari satu provinsi ke provinsi lain. Seperti halnya kegiatan ekonomi, sekitar 60 persen tenaga kerja terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali. Dikarenakan peluang kerja yang tidak tersebar merata, pekerja cenderung lebih memilih pindah dari desa ke pusat industri dan kota besar untuk mencari pekerjaan. Akibatnya, tingkat pengangguran di kota lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran di desa. Provinsi Kepulauan Riau dan Banten telah berhasil mewujudkan tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi antara tahun 2006 dan 2010 di saat industri tumbuh berkembang di daerah-daerah ini. Papua berhasil mewujudkan tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi dan tingkat pengangguran yang rendah, namun lebih dari sepertiga penduduknya miskin, dan ini menunjukkan adanya defisiensi pekerjaan produktif.

Pekerjaan di Indonesia telah beralih dari pertanian ke jasa. Peralihan ini mengalami percepatan sejak tahun 2006. Pada tahun 2010, 42,5 persen pekerja bekerja di sektor jasa. Angka ini jauh melampaui pangsa pekerjaan di sektor pertanian, yaitu sebesar 38,1 persen di tahun yang sama. Akibatnya, permintaan akan keterampilan di pasar tenaga kerja berubah cepat, hal ini terutama disebabkan oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pendorong lain dari perubahan permintaan keterampilan ini adalah inisiatif untuk

“menghijaukan” perekonomian oleh sektor publik dan swasta. Tantangan bagi para pembuat kebijakan di Indonesia, lembaga pendidikan, dan pasar tenaga kerja adalah menerapkan strategi kebijakan dan kurikulum untuk mengakomodir perubahan permintaan keterampilan ini.

Tantangan khusus dalam mencapai tingkat pertumbuhan yang “pro-pekerjaan dan pro masyarakat miskin” adalah mempertahankan atau meningkatkan daya beli pekerja miskin. Kenaikan upah pekerja pabrik masih jauh di bawah tingkat inflasi pangan sejak tahun 2006, kecuali tahun 2009 di mana harga-harga turun akibat melemahnya perekonomian. Pekerja miskin membelanjakan sebagian besar penghasilan mereka untuk konsumsi makanan, sehingga inflasi pangan yang tinggi dan rendahnya kenaikan upah membuat mereka semakin miskin. Menstabilkan harga pangan dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama pekerja berketerampilan rendah, adalah hal yang perlu diberi perhatian ekstra oleh para pembuat kebijakan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah berani dalam meningkatkan akses ke pendidikan. Jumlah pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan sekunder dan tertier di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga, namun kesenjangan dalam hal prestasi pendidikan pekerja ini akan berkurang saat generasi muda Indonesia mulai memasuki pasar tenaga kerja. Anak-anak usia di bawah 7 tahun diharapkan mengenyam rata-rata 13,2 tahun pendidikan di Indonesia, yaitu terlalu lama di antara negara-negara berpenghasilan menengah di Asia Tenggara. Pekerja dengan tingkat pendidikan lebih baik akan lebih kondusif dalam meningkatkan daya saing bisnis di Indonesia.

Sepuluh kedua laporan ini menguraikan tentang tindakan-tindakan nyata untuk meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja di tingkat provinsi. Misalnya pembangunan infrastruktur, lingkungan usaha, analisis diagnostik ketenagakerjaan, konektivitas jalan desa, siklus migrasi yang produktif, pemanfaatan peran perempuan sebagai permodalan manusia secara efektif, hak-hak pekerja, dan dialog sosial. Kendati kondisi sosio-ekonomi di suatu daerah berbeda dengan daerah lain, namun pembuat kebijakan dan mitra sosial di tingkat daerah dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja di bidang-bidang tematis ini.

Motif dasar laporan ini adalah untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dan ketenagakerjaan antar provinsi, atau antara sentra ekonomi dengan lingkungannya. Perbedaan pembangunan dan peluang kerja membuat penduduk desa pindah ke kota dan pusat industri. Sebagian pekerja rumah tangga berhasil menemukan pekerjaan sedangkan yang lain menjadi pengangguran di kota. Tingkat pengangguran di kota memang jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran di desa. Model Harris-Todaro tentang pasar tenaga kerja multi-sektor menyatakan bahwa pembangunan di desa adalah upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang tinggi di kota.

Pemerintah telah memperkenalkan Masterplan untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang memberi dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui enam koridor ekonomi, peningkatan konektivitas nasional, dan meningkatkan pengembangan permodalan manusia. Investasi skala besar yang direncanakan akan menghasilkan banyak peluang ekonomi di negeri ini. Faktor penting yang mengubah peluang ekonomi menjadi penciptaan lapangan kerja produktif adalah pengembangan usaha formal. Dalam hal ini, diharapkan dengan meningkatkan lingkungan bisnis.

Dikarenakan tata pemerintahan yang terdesentralisir dan perbedaan kondisi sosio-ekonomi antar provinsi, pemerintah daerah dan mitra sosial memiliki tugas penting untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dan mampu mempercepat pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja. ILO telah mengembangkan analisis diagnostik tentang metodologi ketenagakerjaan (EDA), yang dapat membantu pembuat kebijakan dan mitra sosial di tingkat daerah dalam mengidentifikasi hambatan penting terhadap pertumbuhan lapangan kerja untuk memperkuat basis dalam merumuskan kebijakan. Apabila sumber daya kebijakan terbatas, maka kebijakan perlu dirumuskan berdasarkan skala prioritas dan urutan kebijakan yang sesuai.

Mutu jaringan jalan adalah penting bagi penduduk desa guna memastikan akses ke layanan sosio-ekonomi, serta menyebarkan layanan-layanan ini hingga ke pedesaan. Prasarana angkutan desa diakui memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan warga desa dan pengurangan kemiskinan. Pendekatan berbasis sumber daya lokal mengombinasikan pemanfaatan tenaga kerja dan peralatan ringan untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur di desa dan penciptaan lapangan kerja.

Potensi lain yang belum dimanfaatkan dalam mendorong perekonomian lokal, terutama di daerah-daerah terpencil tempat asal pekerja migran, adalah pemakaian remitan secara produktif. Remitan yang dikirim pekerja migran tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka tapi juga menyediakan sarana yang tepat untuk keluar dari kemiskinan, bila digunakan secara produktif. Dalam hal ini, menangani pekerja migran yang rentan tindak kekerasan adalah tugas yang mendesak. Di samping itu, layanan sosial dan keuangan seperti pelatihan sebelum keberangkatan, pendidikan keuangan, layanan keuangan dan pelatihan kewirausahaan dapat membantu memanfaatkan remitan secara produktif.

Kendati prestasi pendidikan perempuan sudah meningkat, namun permodalan manusia di kalangan perempuan masih kurang dimanfaatkan akibat berbagai hambatan. Hambatan-hambatan terhadap kesetaraan gender ini mencakup stereotip gender tentang pekerjaan, kewajiban keluarga yang secara tidak proporsional diberikan kepada perempuan, persepsi masyarakat tentang peran dan status perempuan di lingkungan masyarakat. Kerangka hukum dan tindakan afirmatif anti-diskriminasi yang efektif dibutuhkan untuk mengatasi akses perempuan yang tidak adil ke pekerjaan dan praktik diskriminatif di tempat kerja. Menghapus hambatan gender di

tengah masyarakat dan di pasar tenaga kerja serta peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan adalah penting bagi Indonesia dalam mengejar pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dikarenakan tingginya ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap konsumsi domestik, sehingga memungkinkan adanya kondisi kerja yang baik dan mendorong konsumsi domestik yang berkelanjutan atau ditingkatkan adalah kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kendati pengakuan atas hak-hak pekerja di Indonesia telah meningkat, namun pelanggaran hak-hak pekerja masih sering terjadi bahkan di perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja di sektor perekonomian formal. Upaya lebih lanjut dibutuhkan untuk menjamin hak-hak pekerja yang diakui secara hukum. Di samping itu, ekspansi ekonomi secara cepat biasanya mendorong adanya transformasi sosial yang besar. Para pembuat kebijakan dan mitra sosial perlu melakukan penyesuaian dalam lembaga sosio-ekonomi pada beberapa tahun mendatang. Dalam hal ini, efektivitas dialog sosial dalam menciptakan kondisi kerja yang baik dan berkelanjutan serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul akan mempengaruhi pengembangan masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dalam waktu dekat ini.

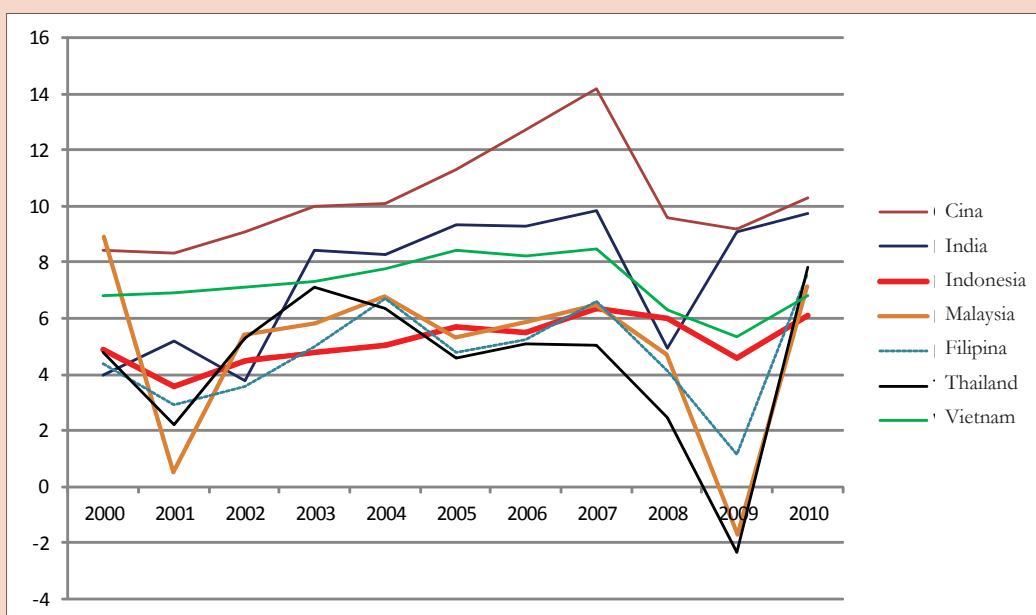
Tren ekonomi dan pasar tenaga kerja

1.1 Tren ekonomi

Indonesia telah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama satu dekade ini yaitu sejak kontraksi ekonomi secara drastis terjadi selama krisis keuangan Asia. Tingkat pertumbuhan ini masih lemah bila dibandingkan masa sebelum krisis yaitu antara pertengahan tahun 1980an hingga masa puncak krisis. Namun, Indonesia berhasil memperoleh momentum pertumbuhan secara stabil. Stabilitas ekonomi makro yang semakin baik di Indonesia perlu diakui. Pemerintah, misalnya, mampu mengurangi rasio utang: PDB dan defisit anggaran. Paparan eksternal yang relatif rendah dalam perekonomian Indonesia dan konsumsi domestik yang kuat telah membantu negeri ini dalam mengatasi krisis keuangan global baru-baru ini, jauh lebih baik dari negara-negara lain di kawasan ini.

Ekspansi ekonomi selama satu dekade

Gambar 1:
Tingkat pertumbuhan ekonomi (beberapa negara pilihan, %)

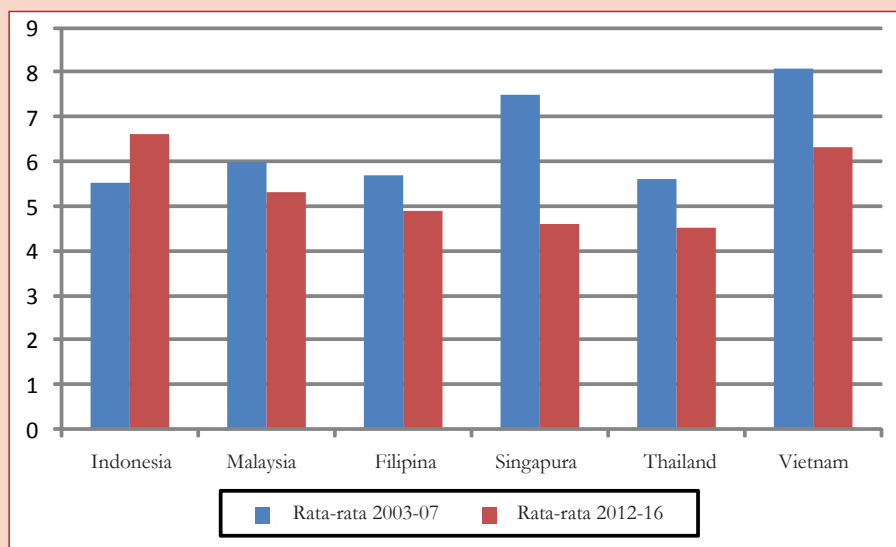


Sumber: Bank Dunia

*Indonesia
diperkirakan mampu
berkembang lebih
cepat dari negara-
negara lain di
kawasan ini*

Menurut perkiraan terbaru Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergerak cepat beberapa tahun mendatang, sehingga mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun antara tahun 2012 hingga 2016. Dikarenakan pemulihan yang berlarut-larut dari krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan krisis hutang negara berdaulat (*sovereign debt*) yang terjadi di Eropa saat ini, permintaan dari negara tujuan ekspor utama di Asia Tenggara akan terus berkurang. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangga Indonesia yang sangat terekspos perdagangan diperkirakan akan berjalan lambat. Dari 2012 hingga 2016, Indonesia diperkirakan akan memperoleh tingkat pertumbuhan tertinggi di kawasan ini, demikian ramalan OECD.

Gambar 2:
Tingkat pertumbuhan PDB riil (perkiraan)



Sumber: OECD, Perkiraan Ekonomi Asia Tenggara 2011/2012

Salah satu fitur utama dari perekonomian Indonesia adalah tingginya konsumsi rumah tangga, yaitu 56,6 persen pada tahun 2010, dari PDB. Sedangkan ekspor bersih (yaitu ekspor dikurangi impor) adalah sebesar 36,0 persen PDB, namun angka ini jauh lebih rendah dari negara-negara lain di kawasan ini. Tingkat ketergantungan ekonomi yang rendah terhadap ekspor ini membantu Indonesia dalam mengatasi dampak krisis keuangan global. Konsumsi rumah tangga akan tetap menjadi andalan negara ini dalam beberapa tahun mendatang. Berbicara tentang respons krisis, pemerintah secara cepat melaksanakan paket stimulus fiskal, yang membantu negara ini di saat permintaan sedang menurun. Respons kebijakan ini tercermin melalui tingginya tingkat pertumbuhan konsumsi pemerintah antara tahun 2008 hingga 2010. Formasi permodalan tetap domestik bruto diharapkan meningkat beberapa tahun mendatang di saat pemerintah dan sektor swasta

mempercepat pendanaan untuk infrastruktur. Undang-Undang (UU) baru tentang akuisisi lahan¹ diharapkan akan mendorong pembangunan infrastruktur.

Tabel 1:
Pengeluaran PDB dengan harga pasar konstan

Jenis pengeluaran	2008 (Trilyun Rupiah)	2010 (Trilyun Rupiah)	Prosentase PDB (%, 2010)	Tingkat pertumbuhan tahunan (%, 2008-2010)
Konsumsi rumah tangga	1.3191,2	1.306,8	56,6	4,7
Konsumsi akhir pemerintah	169,3	196,4	8,5	7,7
Formasi permodalan tetap domestik bruto	493,8	553,4	24,0	5,9
Ekspor bersih	833,3	831,0	36,0	-0,1
Produk Domestik Bruto	2.082,5	2.310,7	100	5,3

Sumber: BPS, kalkulasi penulis

Dari perspektif geo-ekonomi, kegiatan ekonomi di Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Tidak kurang dari 61 persen nilai tambah tahun 2010 berasal dari pulau Jawa. Kombinasi pulau Sumatera dan Jawa menghasilkan lebih dari 82 persen total PDB Indonesia. Sementara provinsi-provinsi di kawasan timur masih jauh tertinggal dari pusat-pusat ekonomi ini. Distribusi peluang ekonomi yang tidak merata ini memperbesar tekanan untuk melakukan migrasi. Hal ini perlu diperbaiki melalui upaya lebih lanjut dengan mengembangkan provinsi-provinsi yang kurang beruntung.

*Perbedaan besar
pertumbuhan
ekonomi antar
provinsi*

Kendati pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional berjalan stabil dan meningkat, namun perlu dicatat bahwa ada perbedaan besar dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dari satu provinsi ke provinsi lain. Di satu sisi, beberapa provinsi yang memiliki pusat industri atau eksploitasi sumber daya alam membukukan tingkat pertumbuhan tahunan dua digit antara tahun 2006 dan 2010 (yaitu Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Papua Barat). Namun di sisi lain, perekonomian di Aceh berkembang rata-rata sebesar 2,3 persen setiap tahun selama periode yang sama di saat proyek-proyek rekonstruksi dan rehabilitasi berakhir. Pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua stagnan sejak tahun 2006.

1 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang (UU) tentang Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Publik pada Desember 2011. Dibawah UU tersebut, pemerintah dapat mengambil alih tanah untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur dengan menawarkan kompensasi uang, relokasi atau berbagi kepemilikan dengan para pemilik tanah.

**Tabel 2: Produk domestik bruto regional (PDBR)
berdasarkan harga pasar konstan tahun 2000 menurut provinsi**

Jenis pengeluaran	2006 (Rp. milyar)	2010 (Rp. milyar)	Prosentase PDBR (2010, %)	Tingkat pertumbuhan tahunan (2006-2010)
Aceh	36.854	33.071	1,5	-2,3
Sumatera Utara	93.347	118.641	5,3	7,8
Sumatera Barat	30.950	38.860	1,7	7,4
Riau	83.371	97.702	4,4	5,4
Jambi	13.364	17.465	0,8	8,5
Sumatera Selatan	52.215	63.736	2,9	6,5
Bengkulu	6.611	8.330	0,4	7,5
Lampung	30.861	38.305	1,7	6,8
Kepulauan Bangka Belitung	9.054	10.867	0,5	5,7
Kepulauan Riau	32.441	41.083	1,8	7,8
Sumatera	389.067	468.061	21,1	6,1
DKI Jakarta	312.827	395.664	17,8	7,6
Jawa Barat	257.499	321.876	14,5	7,3
Jawa Tengah	150.683	186.995	8,4	6,9
DI. Yogyakarta	17.536	21.042	0,9	5,6
Jawa Timur	271.249	342.281	15,4	7,5
Banten	61.342	88.394	4,0	11,1
Java	1.071.136	1.356.253	61,0	7,6
Bali	22.185	28.881	1,3	8,2
Java & Bali	1.093.320	1.385.133	62,3	7,6
Kalimantan Barat	24.768	30.292	1,4	6,5
Kalimantan Tengah	14.854	18.789	0,8	7,6
Kalimantan Selatan	24.452	30.674	1,4	7,1
Kalimantan Timur	96.613	110.580	5,0	4,2
Kalimantan	160.687	190.335	8,6	5,3
Sulawesi Utara	13.473	18.371	0,8	9,6
Sulawesi Tengah	12.672	17.437	0,8	10,4
Sulawesi Selatan	38.868	51.197	2,3	8,9
Sulawesi Tenggara	8.643	12.226	0,6	11,1
Gorontalo	2.176	2.917	0,1	9,5
Sulawesi Barat	3.321	4.744	0,2	11,0
Sulawesi	79.153	106.893	4,8	9,6
Nusa Tenggara Barat	15.604	20.057	0,9	7,2
Nusa Tenggara Timur	10.369	12.532	0,6	6,2
Maluku	3.440	4.251	0,2	6,9
Maluku Utara	2.359	3.035	0,1	7,9

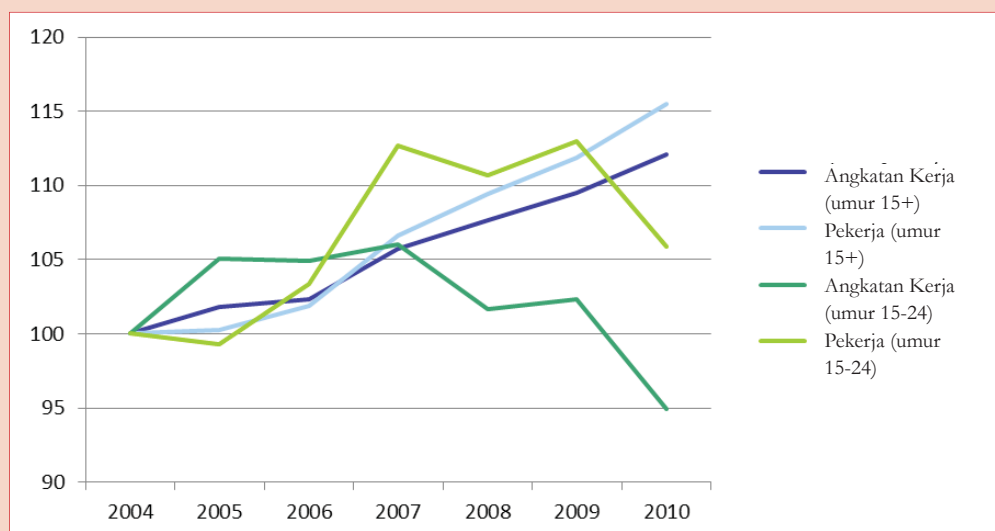
Papua Barat	5.549	8.686	0,4	13,1
Papua	18.402	22.620	1,0	0,5
Nusa Tenggara, Maluku & Papua	55.723	71.181	3,2	5,2
Total 33 Provinsi	1.777.950	2.221.604	100	7,1

Sumber: website BPS

1.2 Tren pasar tenaga kerja

Indikator pasar tenaga kerja secara keseluruhan telah memperlihatkan adanya peningkatan sejak tahun 2006 dan tampaknya pertumbuhan lapangan kerja telah kembali ke jalurnya berkat tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi di sektor jasa. Kendati dampak krisis keuangan global dan pemulihan negara-negara maju masih berlarut-larut, namun tingkat pertumbuhan lapangan kerja cenderung meningkat. Pada faktanya, tingkat pertumbuhan lapangan kerja (usia 15+) telah melampaui tingkat pertumbuhan angkatan kerja sejak tahun 2006. Pekerjaan berkembang setiap tahun rata-rata sebesar 3,2 persen antara tahun 2006 dan 2010, yaitu lebih cepat dari tingkat kecepatan ekspansi angkatan kerja sebesar 2,3 persen per tahun selama periode yang sama. Kendati dengan adanya catatan pertumbuhan lapangan kerja yang luar biasa ini, namun sebagian kelompok pekerja masih kesulitan mencari pekerjaan layak di pasar tenaga kerja.

Gambar 3:
Indeks tenaga kerja dan pertumbuhan lapangan kerja (tahun 2000=100)



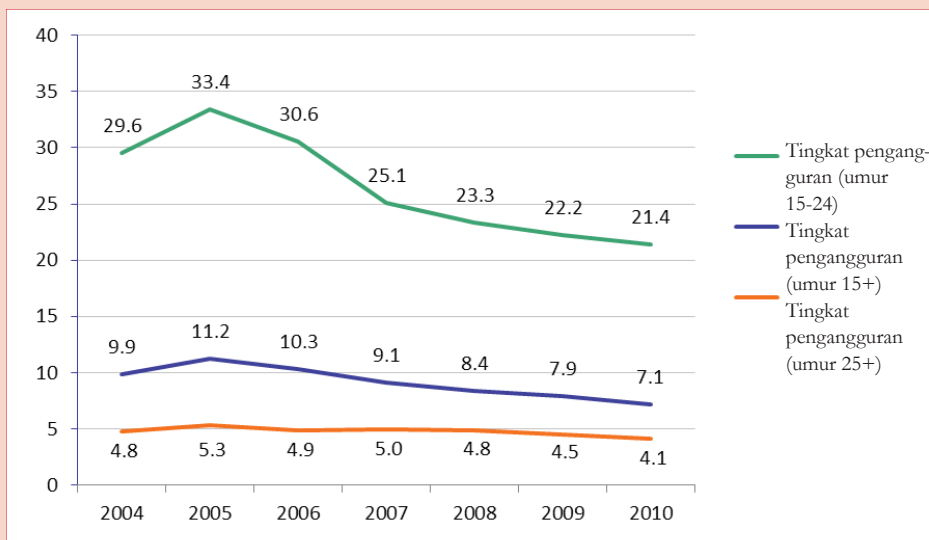
Sumber: BPS, kalkulasi penulis

Pengangguran di kalangan kaum muda (usia 15-24) mencapai puncaknya tahun 2005 yaitu sebesar 33,4 persen dan cenderung menurun sejak saat itu. Namun, angka statistik ini perlu dicermati karena pekerja muda (usia 15-24) lima kali lebih mungkin menganggur dibandingkan pekerja yang lebih tua (usia 25+). Hambatan untuk memasuki pasar tenaga kerja di antara kaum muda masih tetap tinggi. Tingkat pengangguran muda lebih rendah tahun

Tingkat pengangguran di kalangan kaum muda menurun, namun masih tetap tinggi

2010 dibandingkan tahun 2004 hal ini antara lain karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja kaum muda dan penurunan partisipasi pekerja muda. Pada faktanya, tingkat partisipasi pekerja muda menurun dari 54,1 persen tahun 2004 menjadi 49,1 persen tahun 2011. Sebagai pengganti partisipasi pekerja, jumlah kaum muda yang mengejar pendidikan yang lebih tinggi pun lebih banyak dewasa ini. Penghasilan yang lebih baik membuat pendidikan yang lebih tinggi terjangkau bagi banyak keluarga. Hasil dari pendidikan yang lebih tinggi juga membuat investasi di bidang permodalan manusia menjadi lebih menarik. Sementara itu, perlu dicatat bahwa 10,2 persen kaum muda tidak bekerja ataupun bersekolah. Kelompok kaum muda ini mungkin berisiko kehilangan akses ke pasar tenaga kerja jika kondisi ini terus berlanjut.

Gambar 4:
Tingkat pengangguran menurut kelompok umur (%)



Sumber: BPS, kalkulasi penulis

Permodalan manusia untuk kaum perempuan relatif masih kurang dimanfaatkan

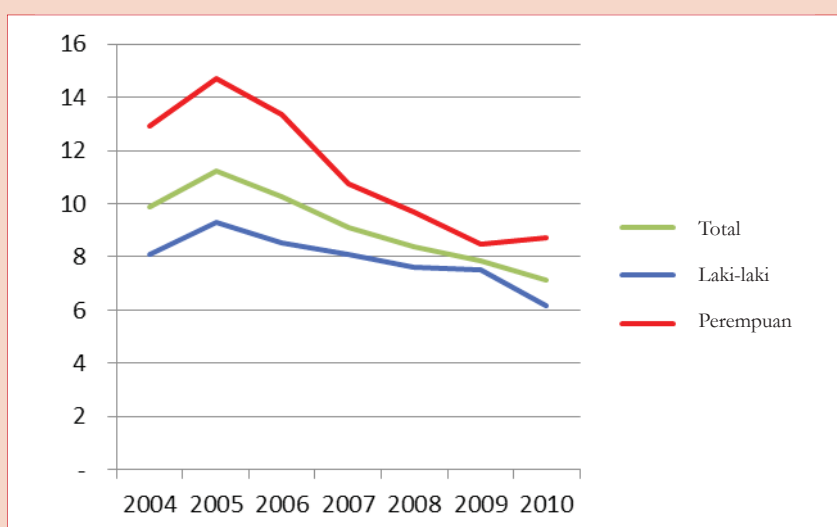
Kelompok pekerja lain yang belum sepenuhnya memperoleh manfaat dari kondisi pasar tenaga kerja yang lebih baik adalah pekerja perempuan. Rasio pekerjaan dibandingkan penduduk perempuan secara gradual telah meningkat sejak tahun 2006, yang secara umum mencerminkan kinerja pasar tenaga kerja. Rasio ini mencatat kenaikan luar biasa sebesar 6,4 poin antara 2006 dan 2010. Namun, kendati terjadi kenaikan ini, kesenjangan gender dalam rasio pekerjaan dibandingkan penduduk tetap besar. Rasio untuk perempuan adalah 31,3 poin lebih rendah dari rasio pekerjaan laki-laki dibandingkan penduduk tahun 2010. Di samping itu, perempuan secara umum menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tampaknya berbagai faktor sosio budaya dan praktik pekerjaan menghambat integrasi perempuan ke dalam pasar tenaga kerja. Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat dan intervensi kebijakan dibutuhkan agar dapat mempersempit kesenjangan gender di pasar tenaga kerja.

Tabel 3:
Rasio pekerjaan dibandingkan penduduk, usia 15-64, %

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total	62,3	60,8	60,9	62,4	63,2	63,6	64,7
Laki-laki	80,5	78,6	78,7	78,4	78,7	78,9	80,3
Perempuan	44,1	42,6	43,0	46,3	47,7	48,2	49,0

Source: BPS, Sakernas

Gambar 5:
Tingkat pengangguran (usia 15+, %)

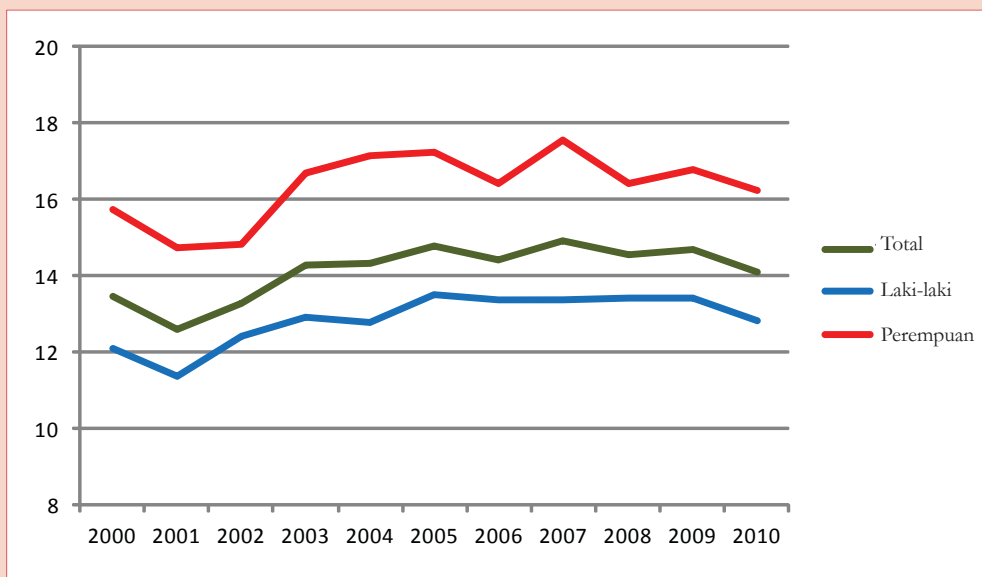


Sumber: BPS, Sakernas

Kendati tingkat pengangguran sudah cenderung menurun, setengah pengangguran dalam hal waktu terus meningkat. Seorang pekerja digolongkan sebagai setengah pengangguran dalam hal waktu jika ia bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan sedang mencari pekerjaan atau bersedia melakukan pekerjaan lebih. Sekitar 14,1 persen total pekerja dianggap setengah pengangguran menurut definisi ini di tahun 2010. Pangsa ini lebih tinggi di kalangan perempuan yaitu sebesar 16,2 persen di tahun yang sama. Beberapa pengamat menganggap masalah ini sebagai salah satu bentuk pengangguran tersembunyi.

*Setengah
pengangguran
meningkat*

Gambar 6:
Tingkat setengah pengangguran dalam hal waktu (%)



Sumber: ILO, Indikator Pekerjaan Layak berdasarkan Sakernas BPS

Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak menjamin pertumbuhan lapangan kerja yang produktif

Kendati kinerja pasar tenaga kerja mengalami peningkatan sebagaimana diuraikan di awal bagian ini, terutama pertumbuhan lapangan kerja yang kuat selama beberapa tahun belakangan ini, namun faktanya sebagian besar pekerjaan di Indonesia masih tergolong informal. Kenyataannya sekitar 60 persen pekerjaan tergolong informal pada tahun 2010. Pangsa pekerjaan informal hanya memperlihatkan penurunan kecil antara tahun 2001 hingga 2010 kendati ekspansi ekonomi telah berlangsung selama satu dekade. Untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif kita perlu memahami faktor-faktor di balik kondisi ini. Didapati bahwa produktivitas pekerjaan informal umumnya lebih rendah dibandingkan pekerjaan formal dan begitu pula halnya dengan kondisi kerja. Sifat informal dari sebagian besar pekerjaan di Indonesia akan mengurangi hasil produktivitas dan mengurangi kemampuan negara ini untuk memperbaiki kondisi kerja. Pertumbuhan ekonomi selama satu dekade ini belum dapat sepenuhnya diwujudkan dalam pertumbuhan lapangan kerja produktif.

Tabel 4:
Pekerjaan informal (usia 15+, %)

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total	61,5	63,3	64,7	63,2	63,2	62,8	62,1	61,3	61,6	59,0
Laki-laki	57,9	60,4	61,9	60,5	61,4	61,4	59,9	59,3	60,1	57,2
Perempuan	67,5	68,3	69,5	68,2	66,6	65,4	65,9	64,5	64,0	61,8

Sumber: BPS, Sakernas

Jika dilihat dari data statistik nasional tentang tenaga kerja dengan statistik di tingkat provinsi, kita dapat melihat perbedaan besar dalam hal pasar tenaga kerja di seluruh negeri ini. Kurang dari 60 persen total angkatan kerja Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali. Pulau Sumatera dan Jawa sendiri menyerap 78,9 persen angkatan kerja, yaitu mirip dengan pola konsentrasi kegiatan ekonomi. Tingkat pengangguran berkisar dari 3,1 persen di Bali sampai 13,7 persen di Banten pada tahun 2010. Daerah perkotaan cenderung memiliki tingkat pengangguran yang tinggi karena pekerja desa pergi ke kota dan pusat industri serta mencari peluang kerja dengan informasi terbatas tentang pasar tenaga kerja. Rasio pekerjaan dibandingkan penduduk (usia 15-64) juga berbeda dari satu daerah ke daerah lain: 78,1 persen di Papua adalah yang tertinggi dan Jawa Barat yang terletak di sisi lain spektrum ini adalah sebesar 55,9 persen.

*Perbedaan kinerja
pasar tenaga kerja
antar provinsi*

Provinsi-provinsi di Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang sangat berbeda. Antara tahun 2006 hingga 2010, yaitu di saat kinerja pasar tenaga kerja umumnya meningkat, Kepulauan Riau dan Banten memperlihatkan tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang sangat tinggi berkat ekspansi industri sedangkan beberapa provinsi lain seperti DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang stagnan. Secara umum, beberapa provinsi di Sumatera memperlihatkan tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif tinggi yaitu di atas angka rata-rata nasional sebesar 3,1 persen per tahun, kecuali Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Pertumbuhan lapangan kerja lebih rendah dari angka rata-rata nasional terjadi di provinsi-provinsi Jawa kecuali di ibukota DKI Jakarta. Provinsi Papua mencapai tingkat pertumbuhan lapangan kerja tahunan rata-rata tercepat antara tahun 2006 hingga 2010, rasio pekerjaan dibandingkan penduduk tertinggi dan tingkat pengangguran terendah keempat tahun 2010. Namun provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di negeri ini, hal ini dikarenakan sebagian besar peluang kerja di provinsi ini masih bersifat informal; sedangkan pekerjaan formal hanya sebesar 17,0 persen pada tahun 2010. Angka rata-rata nasional adalah 30,1 persen pada tahun tersebut.

Tabel 5:
Indikator pasar tenaga kerja pilihan menurut provinsi

	Angkatan kerja ('000)	Tingkat pengangguran (2010, %)	Rasio pekerjaan dibandingkan penduduk (2010, %)	Tingkat pertumbuhan lapangan kerja tahunan (2006-2010, %)
Aceh	1.938,5	8,4	57,9	2,3
Sumatera Utara	6.617,4	7,4	64,3	6,0
Sumatera Barat	2.194,0	7,0	61,7	3,1
Riau	2.377,5	8,7	58,1	5,2
Jambi	1.545,7	5,4	62,2	7,3
Sumatera Selatan	3.665,0	6,7	65,6	3,2
Bengkulu	855,0	4,6	68,6	1,7
Lampung	3.957,7	5,6	64,2	5,1
Kepulauan Bangka Belitung	620,1	5,6	62,8	8,2
Kepulauan Riau	826,5	6,9	64,1	10,5
Sumatera	24.597,5	6,9	63,0	4,8
DKI Jakarta	5.272,6	11,1	60,3	5,3
Jawa Barat	18.893,8	10,3	55,9	3,1
Jawa Tengah	16.856,3	6,2	66,2	0,4
DI. Yogyakarta	1.882,3	5,7	65,8	0,3
Jawa Timur	19.527,1	4,2	66,1	1,4
Banten	5.309,5	13,7	56,4	9,1
Java	67.741,6	7,7	61,9	2,3
Bali	2.246,1	3,1	75,0	3,9
Java & Bali	69.987,7	7,6	62,2	2,4
Kalimantan Barat	2.197,3	4,6	69,8	1,8
Kalimantan Tengah	1.066,7	4,1	67,0	2,0
Kalimantan Selatan	1.840,3	5,3	67,5	4,0
Kalimantan Timur	1.648,5	10,1	59,7	6,6
Kalimantan	6.752,8	6,1	66,1	3,5
Sulawesi Utara	1.036,6	9,6	57,2	3,1
Sulawesi Tengah	1.220,5	4,6	66,0	3,0
Sulawesi Selatan	3.571,3	8,4	58,8	4,6
Sulawesi Tenggara	1.045,9	4,6	68,6	4,5
Gorontalo	456,5	5,2	61,1	4,4
Sulawesi Barat	532,2	3,3	69,1	6,3
Sulawesi	7.862,9	6,9	61,6	4,2
Nusa Tenggara Barat	2.252,1	5,3	63,1	2,8
Nusa Tenggara Timur	2.132,4	3,3	70,3	1,1
Maluku	651,3	10,0	59,9	6,7
Maluku Utara	437,8	6,0	61,2	1,4

Papua Barat	342,9	7,7	64,0	3,0
Papua	1.510,2	3,6	78,1	14,3
Nusa Tenggara, Maluku & Papua	7.326,6	4,9	67,5	4,4
Total 33 Provinsi	116.527,5	7,1	62,9	3,2

Sumber: BPS, kalkulasi penulis

Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak menjamin pertumbuhan lapangan kerja di provinsi-provinsi di Indonesia. Gambar 9 menggambarkan 33 provinsi selain Aceh dan Papua dalam diagram tingkat pertumbuhan lapangan kerja tahunan-tingkat pertumbuhan ekonomi (2006-2010). Tingkat pertumbuhan tahunan ekonomi Aceh dan Papua (2006-2010) adalah sebesar -2,3 persen dan 0,5 persen. Tingkat pertumbuhan lapangan kerja tahunan adalah 2,3 persen di Aceh dan 14,3 persen di Papua. Sumbu koordinat mewakili angka rata-rata nasional, tingkat pertumbuhan lapangan kerja sebesar 3,1 persen per tahun dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen. Perbedaan dalam komposisi industri dan intensitas permodalan kegiatan ekonomi antar provinsi menghasilkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pekerjaan. Beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alam menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ekspansi pekerjaan menengah. Provinsi-provinsi yang memiliki pusat sektor-sektor industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang tinggi. Provinsi-provinsi dengan tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi namun dengan keluaran pertumbuhan yang rendah mengalami kerugian produktivitas, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi kerja secara keseluruhan.

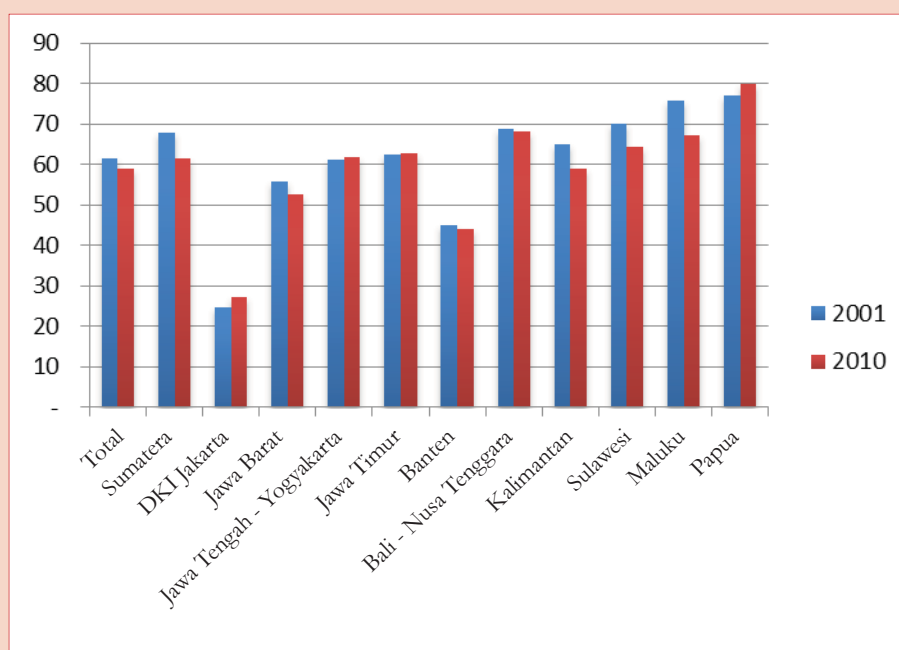
Produktivitas tenaga kerja, yang diukur berdasarkan total nilai tambah provinsi (PDBR) per pekerja, sangat tinggi di DKI Jakarta di mana bisnis terkonsentrasi, Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam yang kaya, dan Riau dan Kepulauan Riau yang merupakan pusat-pusat industri. Produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta, Rp. 84,4 juta per pekerja adalah lebih dari empat kali lebih besar dibandingkan angka rata-rata nasional sebesar Rp. 20,5 juta per pekerja. Provinsi-provinsi yang dominan di sektor pertanian tanpa banyak sumber daya alam yang dapat diekspor atau industri yang berkembang cenderung memiliki produktivitas tenaga kerja yang rendah. Keluaran per pekerja di Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara kurang dari separuh angka rata-rata nasional tahun 2010. Meningkatkan nilai tambah untuk produk-produk pertanian melalui pemrosesan makanan adalah salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

*Kegiatan ekonomi
terkonsentrasi di
beberapa daerah*

Insiden pekerjaan informal dan kemiskinan lebih tinggi di provinsi-provinsi yang terletak di kawasan Indonesia timur

Insiden pekerjaan informal sangat bervariasi antar provinsi yang berkisar dari 27,3 persen di DKI Jakarta sehingga 79,8 persen di Papua (provinsi Papua dan Papua Barat digabung). Pangsa pekerjaan informal di tingkat nasional menurun 2,5 persen poin antara tahun 2001 hingga 2010; namun, ini bukan kecenderungan yang umum antar provinsi dan kelompok provinsi secara geografis. Pada faktanya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku mencatat penurunan besar dalam hal pekerjaan informal selama periode yang sama, sementara DKI Jakarta dan Papua menunjukkan adanya peningkatan pekerjaan informal. Secara umum, informalitas pekerjaan di provinsi-provinsi di kawasan Timur adalah lebih tinggi.

Gambar 7:
Pekerjaan informal menurut daerah (usia 15+, persen)



Sumber: BPS, Statistik Upah Empatbulanan

Catatan: Beberapa provinsi dikelompokkan bersama dalam satu kawasan yaitu:

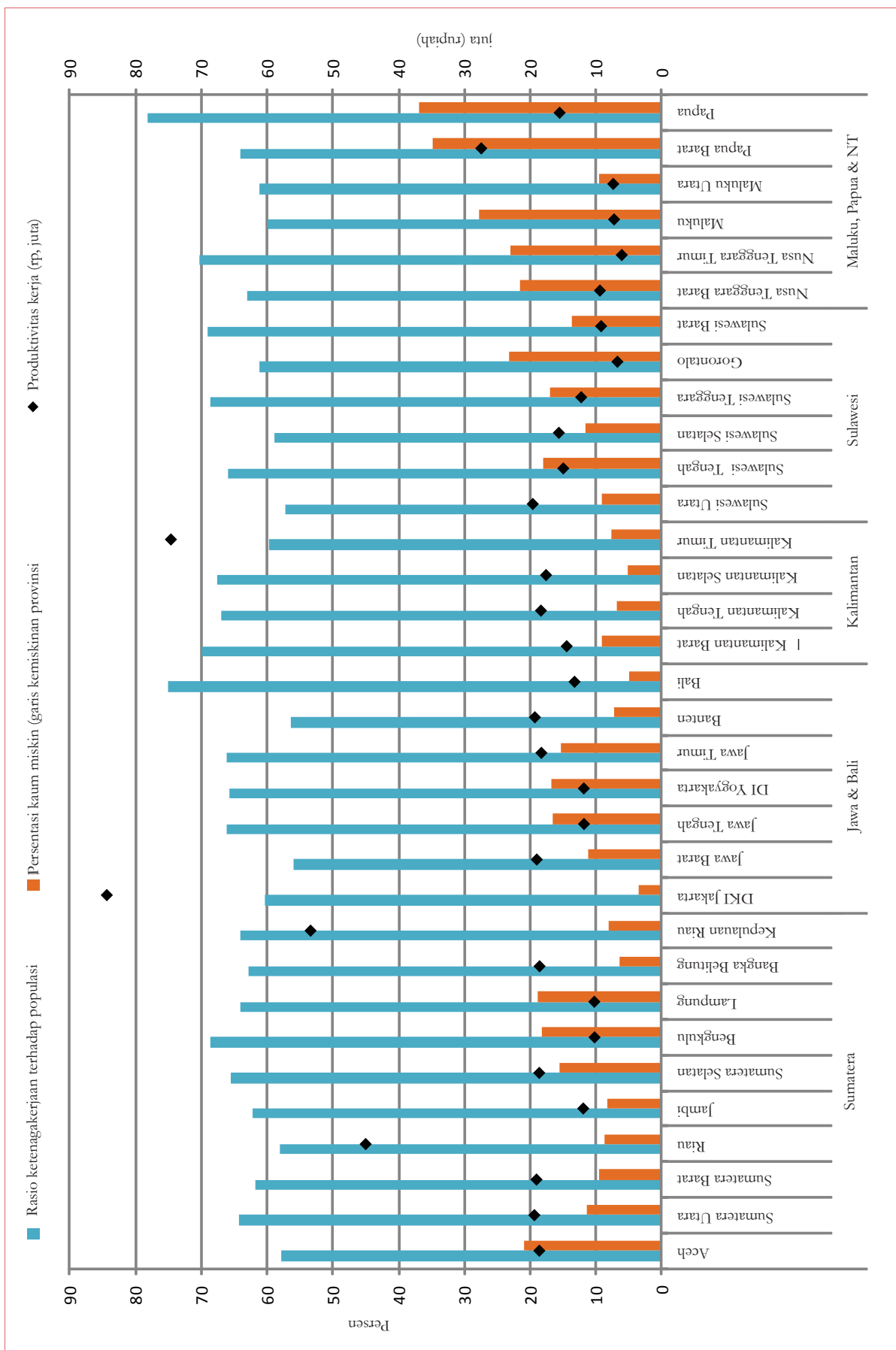
Sumatera (semua provinsi yang ada di Sumatera), Bali-Nusa Tenggara (Bali, NTB dan NTT), Kalimantan (semua provinsi yang ada di Kalimantan), Sulawesi (semua provinsi di Sulawesi), Maluku (Maluku dan Maluku Utara) dan Papua (Papua Barat dan Papua)

Insiden kemiskinan, prosentase masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi, sangat bervariasi di negeri ini. Lebih dari sepertiga penduduk digolongkan miskin di Papua dan Papua Barat. DKI Jakarta dan Bali memiliki tingkat insiden kemiskinan yang rendah berkat kegiatan ekonominya yang berkembang pesat. Perlu dicatat bahwa rata-rata tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi tidak selalu menghasilkan insiden kemiskinan yang rendah di daerah. Sebagai contoh, Papua Barat memiliki insiden kemiskinan yang tinggi kendati produktivitas tenaga kerja di daerah tersebut jauh melampaui angka rata-rata nasional, dan ini menunjukkan bahwa keluaran yang tinggi, terutama di sektor pertambangan, tidak terbagi merata di antara penduduk secara lebih luas di provinsi-provinsi ini.

Sebaliknya, Maluku Utara mengelola insiden kemiskinan yang rendah serta produktivitas tenaga kerja yang rendah pula. Perlu dicatat bahwa insiden kemiskinan diukur menggunakan garis kemiskinan provinsi, bukan garis kemiskinan nasional atau internasional, yang mencerminkan biaya hidup di masing-masing provinsi. Biaya tinggi dalam perekonomian daerah di beberapa provinsi mungkin telah mempengaruhi kemiskinan secara negatif. Faktor penyebab ekonomi berbiaya tinggi antara lain adalah transportasi yang tidak efisien serta fungsi pasar yang lemah.

Hasil-hasil di mana pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja tidak sejalan dapat memberi implikasi kebijakan yang penting bagi para pembuat rencana kebijakan lokal. Pertama, kebijakan yang mengejar pertumbuhan ekonomi sendiri tidak akan cukup untuk mewujudkan pembangunan yang menghasilkan banyak lapangan kerja dan mengangkat standar kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Kombinasi kebijakan yang tepat di berbagai bidang termasuk kebijakan industri, kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia serta kebijakan pasar tenaga kerja diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan inklusif. Kedua, Indonesia memerlukan strategi pertumbuhan yang seimbang antar daerah. Kegiatan ekonomi terkonsentrasi di beberapa bidang: permodalan, pusat industri dan lokasi-lokasi yang punya sumber daya alam kaya. Hasil-hasil yang dicapai pasar tenaga kerja mencerminkan gambaran ini. Strategi yang dimaksudkan untuk mengembangkan lebih banyak pusat-pusat industri dan bisnis dengan keseimbangan regional yang baik dapat dibenarkan apabila tujuan kebijakan adalah pertumbuhan inklusif.

Gambar 8: Ketenagakerjaan, produktivitas tenaga kerja dan kemiskinan (2010)



Sumber: BPS, kalkulasi penulis
Catatan: Produktivitas tenaga kerja adalah PDBR per pekerja dalam juta rupiah.

Gambar 9: Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan tahunan menurut provinsi (2006-2010, %)



Sumber: BPS, kalkulasi penulis

Catatan: Angka ini tidak termasuk Aceh dan Papua karena mereka di luar kisaran yang ada. Tingkat pertumbuhan tahunan ekonomi di Aceh (2006-2010) adalah sebesar -2,3% sedangkan Papua adalah 0,5%. Tingkat pertumbuhan lapangan kerja tahunan adalah sebesar 2,3% dan 14,3% di daerah-daerah tersebut.

Pasar tenaga kerja di Indonesia telah mengalami peralihan struktural dalam hal pekerjaan dan sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, dan ini mencerminkan adanya perubahan struktural secara ekonomi. Pertama, pangsa pekerjaan di sektor pertanian mengalami penurunan. Sektor pertanian biasanya merupakan sektor terbesar, tapi dewasa ini sektor jasa mempekerjakan lebih banyak pekerja dari sektor pertanian. Kedua, pangsa pekerjaan manufaktur sedikit menurun antara tahun 2000 hingga 2010. Beberapa orang pengamat mengkhawatirkan pola pembangunan yang dikategorikan melalui ekspansi sektor jasa secara cepat, hingga melampaui industri. Kenyataannya adalah komposisi manufaktur sub-sektor ini telah beralih untuk mendukung produktivitas. Sejak krisis keuangan Asia, sektor-sektor yang intensif tenaga kerja (misalnya tekstil, barang-barang yang terbuat dari kulit dan alas kaki) telah mengalami penurunan sementara sub-sektor lain yang intensif modal (misalnya peralatan transportasi dan permesinan) mengalami peningkatan. Ketiga, pembiayaan konstruksi berdasarkan pangsa PDB telah mengalami peningkatan (yaitu dari 5,8 persen tahun 2004 menjadi

Pekerjaan sudah beralih ke sektor jasa

6,4 persen tahun 2009), dan ini terkait dengan pertumbuhan lapangan kerja secara substansial dalam sektor konstruksi.

Tabel 6: Pangsa sektor dalam hal pekerjaan (%)

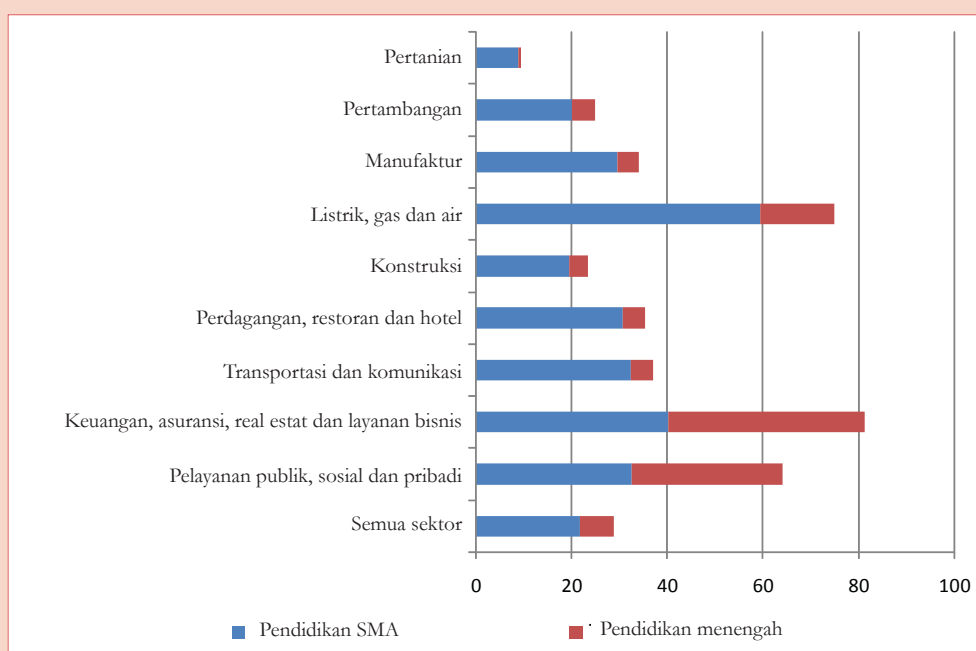
Tahun	2000	2005	2010
Pertanian	45,3	44,0	38,1
Pertambangan dan penggalian	0,5	1,0	1,2
Manufaktur	13,0	12,7	12,8
Listrik, gas dan air bersih	0,1	0,2	0,2
Konstruksi	3,9	4,9	5,2
Perdagangan, restoran dan perhotelan	20,6	19,1	20,8
Transportasi dan komunikasi	5,1	6,0	5,2
Keuangan, asuransi, properti, dan layanan bisnis	1,0	1,2	1,6
Pelayanan publik, sosial & pribadi	10,7	11,0	14,7
Total	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS, Situasi Tenaga Kerja di Indonesia

*Peningkatan
permintaan
akan pekerja
berpendidikan*

Perubahan komposisi sektoral dalam perekonomian dan angkatan kerja juga telah mengubah permintaan keterampilan. Dengan pertumbuhan industri jasa, pekerja berpendidikan semakin banyak dibutuhkan. Gambar 10 memperlihatkan pangsa pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan sekunder dan tertier di sembilan sektor utama. Di sini jelas bahwa sektor jasa merekrut lebih banyak sarjana daripada sektor pertanian atau industri kecuali sektor utilitas. Apabila kecenderungan peralihan struktural dalam komposisi sektor tenaga kerja ini berlanjut, maka lebih banyak pekerja berpendidikan yang akan dibutuhkan. Kecenderungan upah secara umum mencerminkan permintaan keterampilan ini. Pada faktanya, upah sarjana meningkat pesat sementara upah untuk pekerja dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah relatif stagnan.

Gambar 10:
Pangsa pekerja menurut pendidikan dan sektor (2009, %)



Sumber: BPS, Situasi Tenaga Kerja di Indonesia, kalkulasi penulis

Di samping perubahan dalam komposisi sektor pekerjaan, kebijakan publik juga mengubah permintaan keterampilan di pasar tenaga kerja. Salah satu bidang kebijakannya adalah komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen² dari tahun 2005 hingga tahun 2020. Promosi pembangunan berkarbon rendah seperti pemakaian secara lebih luas energi terbarukan serta kenaikan efisiensi energi akan menghasilkan permintaan keterampilan baru untuk pekerjaan ramah lingkungan (*green jobs*). Laporan ILO terbaru³ menyatakan bahwa keberhasilan transisi ini ke perekonomian yang lebih hijau tergantung pada kapasitas nasional untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Memastikan koherensi antara kebijakan lingkungan dengan kebijakan pengembangan keterampilan adalah kondusif untuk menghijaukan perekonomian di Indonesia.

Peningkatan permintaan keterampilan untuk pekerjaan ramah lingkungan (green jobs)

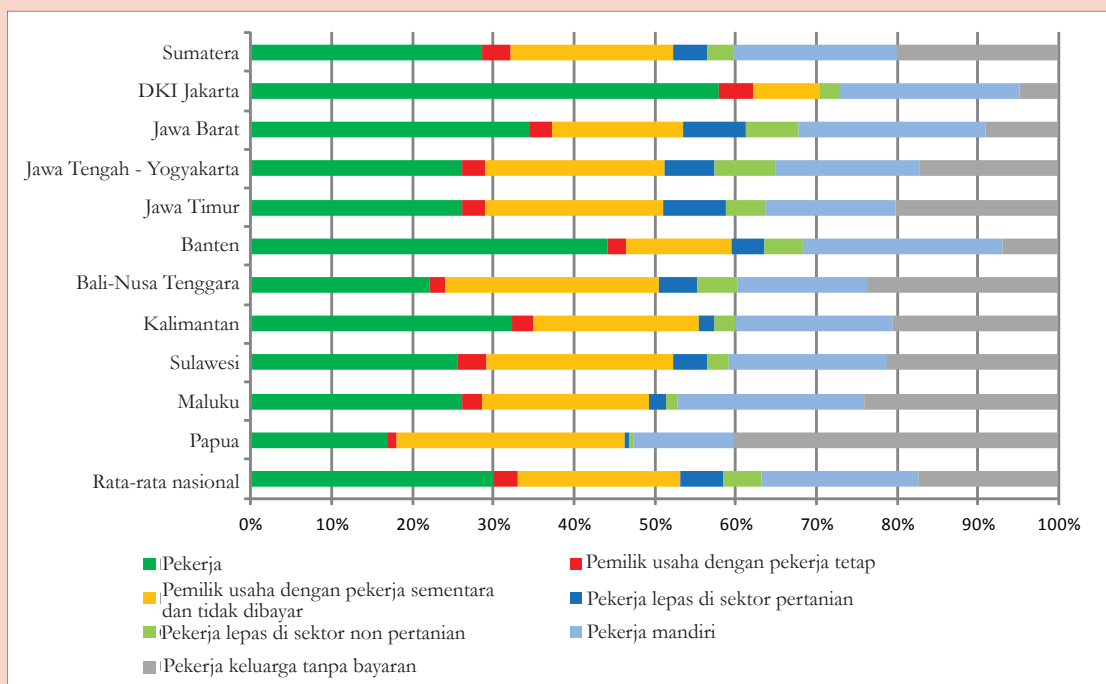
Distribusi pekerja menurut status pekerjaan juga memperlihatkan adanya perbedaan secara regional. Sekitar 58,0 persen pekerja di ibukota melakukan jenis pekerjaan berupah, yaitu hampir dua kali lipat angka rata-rata nasional. Pekerja di Papua (provinsi Papua Barat dan Papua), misalnya, kurang beruntung dalam mengakses pekerjaan produktif: di mana hanya 17,0 persen yang melakukan pekerjaan berupah sementara 40,3 persen adalah pekerja keluarga tanpa upah. Secara umum, penghasilan pekerja lebih tinggi dan stabil dibandingkan pekerja harian. Oleh karena itu, perbedaan secara regional dalam hal peluang kerja serta berbagai faktor lain menimbulkan kesenjangan penghasilan di antara pekerja di daerah, sehingga mengakibatkan perpindahan yang lebih tinggi dan pengangguran di kota.

Disparitas secara geografis dalam hal peluang kerja berupah

2 41 persen dengan bantuan internasional.

3 Sumber: ILO (2011) *Skills for Green Jobs: A Global View* (Geneva).

Gambar 11:
Pekerjaan menurut status ketenagakerjaan (usia 15+, 2010, %)



Catatan: Beberapa provinsi dikelompokkan bersama sebagai satu kawasan misalnya: Sumatera (semua provinsi yang ada di Sumatera), Bali-Nusa Tenggara (Bali, NTB dan NTT), Kalimantan (semua provinsi di Kalimantan), Sulawesi (semua provinsi di Sulawesi), Maluku (Maluku dan Maluku Utara) dan Papua (Papua Barat dan Papua).

Inflasi pangan lebih besar dari kenaikan upah

Tingkat inflasi sangat berfluktuasi selama lima tahun terakhir akibat guncangan eksternal, sehingga mempersulit upaya untuk mempertahankan daya beli pekerja. Krisis pangan dunia mendorong peningkatan harga pangan dunia tahun 2007 dan 2008, yang diikuti dengan jatuhnya harga-harga akibat krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat. Bank Indonesia ditugaskan untuk menangani tekanan inflasi dalam kisaran target yang ditentukan, namun mengontrol inflasi akibat guncangan eksternal bukanlah hal yang mudah. Menyesuaikan upah berdasarkan inflasi adalah tugas lain yang penuh tantangan karena negosiasi upah yang biasanya dilakukan setahun sekali, tampaknya tidak memadai bila tingkat inflasi tinggi. Di samping itu, pengusaha yang berintegrasi dengan rantai suplai global atau yang menghadapi persaingan regional/global semakin khawatir dengan masalah biaya.

Tabel 7: Tingkat inflasi (dari tahun ke tahun, %)

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
Makanan	12,9	11,3	16,4	3,9	15,6
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	6,4	6,4	12,5	7,8	7,0
Perumahan, Air bersih, Listrik, Gas dan BBM	4,8	4,9	10,9	1,8	4,1
Pakaian	6,8	8,4	7,3	6,0	6,5
Layanan Kesehatan	5,9	4,3	8,0	3,9	2,2
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	8,1	8,8	6,7	3,9	3,3
Transportasi, Komunikasi dan Layanan Keuangan	1,0	1,3	7,5	-3,7	2,7
Total	6,6	6,6	11,1	2,8	7,0

Sumber: Situs BPS

Tabel 8: Upah nominal pekerja produksi di sektor manufaktur di bawah tingkat penyelia

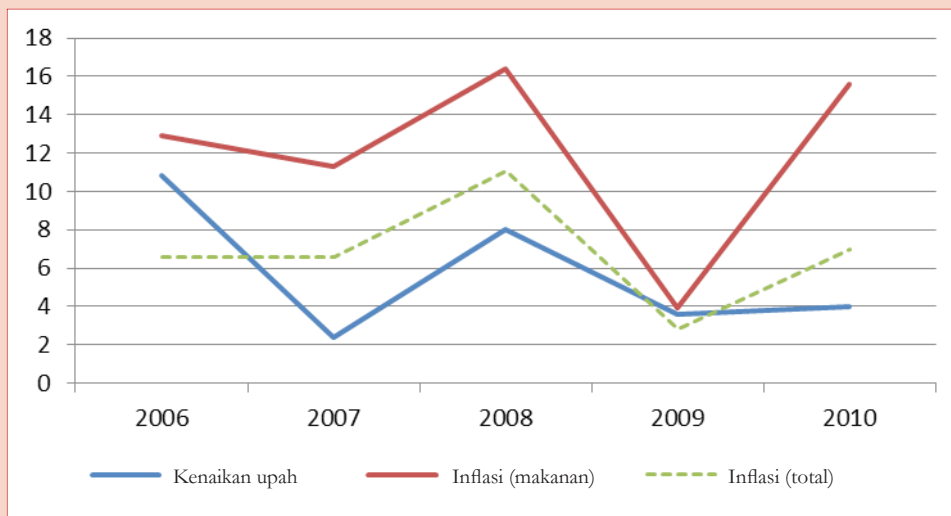
Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
Nominal upah (Maret, Rp. 000)	982,4	1.006,2	1.093,4	1.134,7	1.182,4
Kenaikan upah (dari tahun ke tahun, %)	10,8	2,4	8,0	3,6	4,0
Tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (dari tahun ke tahun, %)	3,8	1,6	3,3	2,2	2,9

Catatan: Produktivitas tenaga kerja ditetapkan sebagai keluaran per pekerja

Sumber: BPS, kalkulasi penulis

Dalam diskusi kami tentang upah, perlu dicatat mengenai inflasi pangan yang tinggi dan dampaknya terhadap daya beli pekerja. Tingkat inflasi harga pangan direncanakan berkisar dua-digit setiap tahun sejak tahun 2006, kecuali tahun 2009. Jika tingkat inflasi pangan dibandingkan dengan tingkat inflasi tidak termasuk pangan, maka tingkat inflasi pangan jauh melampaui tingkat inflasi. Gambar 12 menyandingkan tingkat inflasi pangan dengan tingkat kenaikan upah pekerja produksi di sektor manufaktur di bawah tingkat penyelia antara tahun 2006 hingga 2010. Tampak jelas bahwa kenaikan upah jauh di belakang lonjakan harga pangan kecuali tahun 2009, yang telah secara efektif mengurangi daya beli pekerja. Sebagai contoh, dari tahun ke tahun tingkat inflasi harga pangan tahun 2010 adalah sebesar 15,6 persen, sementara tingkat kenaikan upah hanya 4,0 persen. Inflasi pangan yang tinggi dan kenaikan upah yang rendah berdampak negatif terhadap pekerja miskin yang gajinya sesuai upah minimum atau lebih rendah. Perlu diingat bahwa pekerja miskin membelanjakan sebagian besar penghasilan mereka untuk konsumsi makanan. Ironisnya, inflasi pangan yang tinggi merugikan mereka yang berpenghasilan rendah selama masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Gambar 12:
Harga pangan dan upah pekerja produksi di sektor manufaktur di bawah
tingkat penyelia (%)



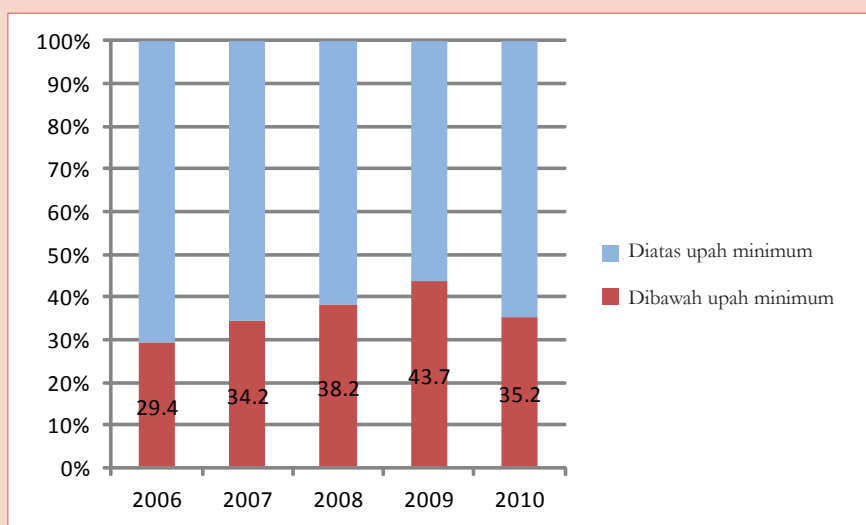
Sumber: BPS, kalkulasi penulis

*Upah lebih dari
sepertiga pekerja
di bawah upah
minimum*

Lebih dari sepertiga pekerja⁴ menerima upah di bawah upah minimum yang ditetapkan di Indonesia. Upah minimum ditentukan secara lokal berdasarkan kebutuhan konsumsi minimum di daerah tersebut. Pangsa pekerja yang memperoleh penghasilan di bawah kenaikan upah minimum antara tahun 2006 hingga 2009, yaitu mencapai angka 43,7 persen tahun 2009. Angka ini turun menjadi 35,2 persen tahun 2010, namun masih lebih tinggi dari tahun 2006. Hal ini dikarenakan oleh kenaikan upah minimum secara terus-menerus selama beberapa tahun belakangan ini, yang mungkin telah menggolongkan lebih banyak pekerja di bawah upah minimum. Kepatuhan yang buruk terhadap peraturan tentang upah dan pengawasan tenaga kerja yang kurang memadai mungkin juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingginya pangsa pekerja yang memperoleh upah di bawah upah minimum yang berlaku. Periode antara 2006 hingga 2010 umumnya memperlihatkan kinerja pasar tenaga kerja dan pertumbuhan lapangan kerja yang lebih baik; namun, sebagaimana yang ditunjukkan angka statistik tentang situasi pasar tenaga kerja di bawah belum banyak berkembang.

4 Pekerja mencakup karyawan dan buruh harian di sektor pertanian dan non-pertanian, tapi tidak termasuk pekerja keluarga tanpa upah.

Gambar 13:
Upah/gaji bersih bulanan pekerja dan upah minimum yang berlaku



Sumber: BPS

Prestasi pendidikan pekerja Indonesia masih di bawah negara tetangga dalam hal proporsi pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan sekunder dan tertier.⁵ Pada faktanya, masa belajar rata-rata orang Indonesia dewasa adalah 5,8 tahun pada tahun 2010, yaitu lebih singkat dari indikator yang sama di Malaysia, Thailand dan Filipina. Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk memperbaiki pendidikan dan meningkatkan pengeluaran publik untuk pendidikan selama beberapa tahun belakangan ini. Dampak positif dari komitmen politik ini dapat dilihat dari data statistik terbaru. Sebagai contoh, saat ini anak-anak Indonesia diperkirakan mengenyam pendidikan selama 13,2 tahun, yaitu lebih lama dari negara tetangga (Tabel 9). Di samping itu, tingkat pendaftaran sekolah menengah dan universitas meningkat dengan beberapa disparitas antar provinsi. Angka ini sendiri tidak memperlihatkan mutu pendidikan atau hasil pendidikan; namun, memang semakin banyak anak-anak yang memperoleh manfaat dari pendidikan dan sebagian dari mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Prestasi pendidikan mengalami peningkatan

Tabel 9: Tren waktu dalam tingkat pendaftaran bersih di Indonesia (1994–2010)

Tahun	1994	1997	2000	2003	2006	2010
SD	92,1	92,3	92,3	92,6	93,5	94,7
SMP	50,0	57,8	60,3	63,5	66,5	67,6
SMA	33,2	36,6	39,3	40,6	43,8	45,5
Universitas hingga diploma/akademi	7,9	7,7	8,0	8,6	8,9	11,0

Catatan: 'Diploma' dan 'akademi' adalah program non-sarjana setelah lulus SMA. Data ini tidak termasuk partisipasi pendidikan non-formal untuk memudahkan perbandingan waktu.

Sumber: Situs BPS.

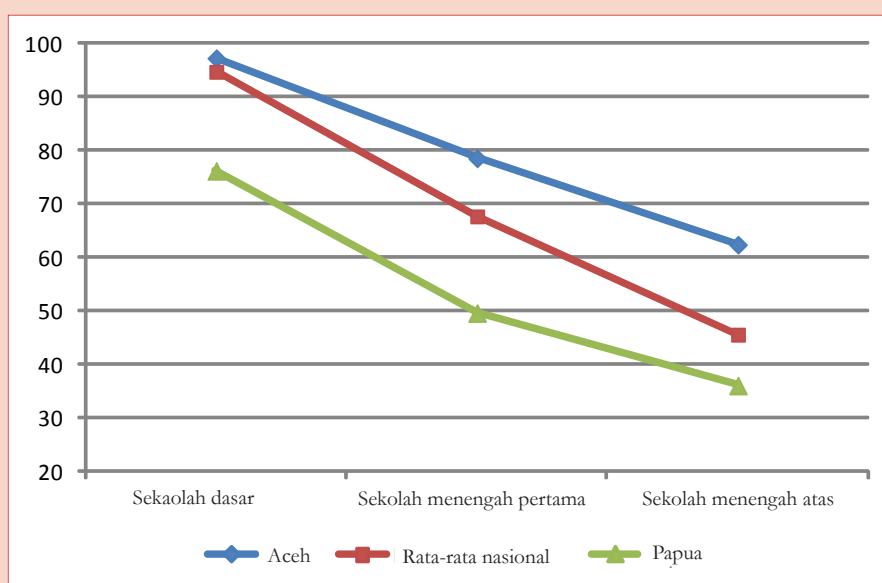
5 Lihat ILO (2011) *Tren sosial dan ketenagakerjaan di Indonesia 2010*

Tabel 10: Pengeluaran publik untuk pendidikan dan masa belajar

	Pengeluaran publik untuk pendidikan (% PDB)	Pengeluaran publik untuk pendidikan (dalam % total pengeluaran publik)	Masa belajar rata-rata (usia dewasa 25+)	Masa belajar yang diharapkan (anak-anak di bawah usia 7)
Tahun	2008	2008	2010	2010
Kamboja	1,6	12,4 (2007)	5,8	9,8
Indonesia	2,8	17,9	5,8	13,2
Laos	2,3	12,2	4,6	9,2
Malaysia	4,1	17,2	9,5	12,6
Filipina	2,8	16,9	8,9	11,9
Thailand	3,8	20,5	6,6	12,3
Viet Nam	5,3	19,8	5,5	10,4

Sumber: Lembaga Statistik UNESCO, Pusat Data

Gambar 14:
Rasio pendaftaran bersih (2010)



Sumber: BPS, Susenas

Catatan: Data termasuk pendidikan non formal

Masa belajar rata-rata telah mengalami peningkatan di Indonesia, dan ini kondusif untuk meningkatkan daya saing Indonesia selama pendidikan sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Dalam hal ini, tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan lulusan SMA agak mengkhawatirkan. Faktor-faktor di balik tingkat pengangguran yang tinggi di antara lulusan SMA ini antara lain, pertama dan yang terpenting, kurangnya lapangan kerja di Indonesia. Tingginya setengah pengangguran dan pengangguran adalah wujud dari kurangnya peluang kerja. Kedua, tingginya tingkat pengangguran di antara lulusan SMA mungkin dikarenakan

keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan kebutuhan. Tingkat keterampilan lulusan SMA mungkin tidak sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja atau keterampilan mereka tidak sesuai dengan permintaan pasar. Ketiga, peralihan yang lancar dari sekolah ke pekerjaan membutuhkan bantuan termasuk dalam hal orientasi karir, konseling, peluang magang dan informasi terbaru tentang pekerjaan, di mana penyediaan layanan ini masih belum optimal di Indonesia.

Dengan adanya peningkatan di bidang alih daya (*outsourcing*), semakin banyak pekerja muda yang terikat kontrak jangka pendek. Kontrak jangka pendek ini menghambat pengusaha untuk melakukan investasi di bidang permodalan manusia bagi karyawan mereka. Ada indikasi bahwa kursus pelatihan keterampilan yang ada tidak sesuai dengan sasaran dan potensi pembangunan nasional dan daerah. Pemakaian pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi keterampilan nasional masih belum optimal. Dikarenakan pendidikan dan pengembangan keterampilan merupakan faktor penting bagi pertumbuhan lapangan kerja produktif, nampaknya masih ada ruang yang cukup besar untuk melakukan reformasi.

Mempromosikan pertumbuhan yang menghasilkan banyak lapangan kerja di daerah

Setengah bagian pertama laporan ini menyorot perbedaan kondisi sosio-ekonomi dan pasar tenaga kerja antar provinsi di Indonesia. Di sini jelas bahwa tidak ada satu solusi pun yang ‘cocok untuk mengatasi semua’ persoalan ketenagakerjaan dan sosial yang dihadapi provinsi-provinsi yang ada di negeri ini. Untuk itu, setengah bagian kedua dari laporan ini menguraikan intervensi kebijakan yang difokuskan secara lokal untuk menciptakan lapangan kerja, oleh karena itu tema mendasar dari laporan ini adalah: mempromosikan pertumbuhan yang banyak menghasilkan lapangan kerja di daerah. Bagian-bagian berikutnya berisi ringkasan tentang latar belakang pilihan tema ini secara teoritis dan menyediakan kajian tentang kebijakan pembangunan ekonomi regional pemerintah, yang mengatur tentang diskusi tematis berikutnya. Bab ini memperkenalkan analisis diagnostik ketenagakerjaan sebagai langkah pertama untuk menyusun kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah serta pembangunan infrasktruktur berbasis sumber daya lokal sebagai intervensi kebijakan penting yang diharapkan mampu mengatasi secara simultan kekurangan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur yang kurang memadai di desa. Bab ini kemudian akan membahas intervensi kebijakan dalam mengalihkan perpindahan tenaga kerja menjadi peluang nyata untuk mengurangi kemiskinan di desa serta mendorong pembangunan ekonomi lokal. Laporan ini juga akan membahas persoalan terbaru yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja di negeri ini yaitu persoalan kesetaraan gender dan hak-hak pekerja.

2.1 Mengurangi pengangguran melalui pembangunan desa

Pembangunan desa untuk mengurangi pengangguran: wawasan dari model pasar tenaga kerja multi-sektoral

Himbauan untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di daerah, terutama di daerah yang masih di bawah angka rata-rata nasional, berawal dari argumentasi normatif yang mendukung adanya pertumbuhan yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Pada faktanya, kebijakan pembangunan pemerintah sesuai dengan argumentasi ini. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan masterplan untuk pembangunan ekonomi yang seiring dengan enam koridor ekonomi yang sedang berjalan di seluruh negeri.

Ada alasan mendesak lain yang mendorong pembangunan desa dan mempercepat penciptaan lapangan kerja di daerah di mana kekurangan pekerjaan produktif sudah akut. Argumentasi kedua mengambil wawasan dari model Harris-Todaro, yaitu model pasar tenaga kerja multi-sektor yang terkenal. Singkatnya, model ini memprediksikan bahwa upaya untuk mengurangi pengangguran di kota membutuhkan pembangunan di desa. Kesimpulan ini mungkin terdengar kontra-intuitif, namun sub-bagian berikut ini menjelaskan alasannya.

Pasar tenaga kerja biasanya tidak bersifat monolitik dan segmen pasar tenaga kerja yang berbeda memiliki fitur yang berbeda pula. Untuk itu, para peneliti telah mengembangkan beberapa model pasar tenaga kerja multi-sektor untuk menganalisis hubungan antar berbagai segmen pasar tenaga kerja yang berbeda. Sejak era tahun 1950an, penerima hadiah Nobel Ekonomi Arthur Lewis telah membedakan antara perekonomian informal dengan perekonomian formal. Sejak saat itu, para ahli ekonomi tenaga kerja mengembangkan beberapa model pasar tenaga kerja multi-sektor. Di antaranya adalah model pasar tenaga kerja multi sektor yang dikembangkan John Harris dan Michael Todaro⁶ yang telah melakukan pengembangan besar dalam menganalisis pasar tenaga kerja multi sektor dengan memasukkan pengangguran terbuka di daerah perkotaan.

Model Harris-Todaro ini (lihat Kotak) berasumsi bahwa perbedaan upah antar perekonomian formal/kota dengan informal/desa, yang memicu perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota di mana lebih banyak pekerjaan formal ditawarkan dan upah umumnya lebih tinggi. Pengusaha di sektor perekonomian formal merekrut pekerja hingga produk marjinal tenaga kerja setara dengan upah yang berlaku di sektor perekonomian formal sementara pencari kerja yang lain menjadi pengangguran. Sebaliknya, model ini mengasumsikan hambatan yang rendah dalam memasuki pasar tenaga kerja dalam perekonomian informal. Inti dari model ini adalah bahwa pekerja mengalokasikan diri mereka untuk mencari pekerjaan di sektor formal maupun informal untuk memperoleh upah yang adil.

6 Harris, John and Michael Todaro (1970). "Migration, Unemployment, and Development: A Two Sector Analysis," *American Economic Review*, 40: 126-142.

Model ini menawarkan implikasi kebijakan terhadap Indonesia di mana tingkat pengangguran di kota jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran di desa. Intervensi kebijakan untuk menciptakan pekerjaan di kota mungkin tidak memadai karena dapat menyebabkan migrasi yang lebih besar dan pengangguran yang lebih tinggi di kota. Oleh karena itu, upaya kebijakan dibutuhkan dalam pembangunan desa dan mendukung pertumbuhan lapangan kerja formal di kota.

Kotak 1: Model Harris-Todaro

Penyetaraan upah dan kondisi ekuilibrium dalam model Harris-Todaro dinyatakan sebagai berikut:

$$W_F \frac{E_F}{L_F} = W_I$$

Di mana

W : upah

E : pekerjaan

L : angkatan kerja (pekerja maupun pengangguran)

Subskrip F dan I mengacu pada perekonomian formal dan perekonomian informal.

Dengan mengubah persamaan ini, kita dapat menggunakan angkatan kerja di sektor perekonomian formal dengan istilah E_F , W_F dan W_I .

$$L_F = E_F \frac{W_F}{W_I}$$

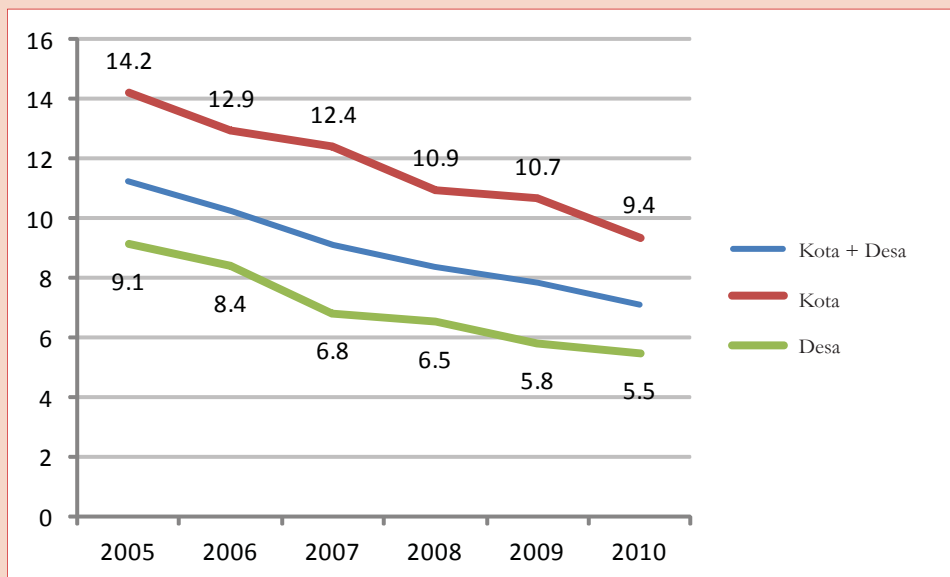
Pengangguran dalam perekonomian formal (U_F) adalah angkatan kerja dikurangi pekerjaan. Maka,

$$U_F = L_F - E_F = E_F \left(\frac{W_F}{W_I} - 1 \right)$$

Ia mengakui bahwa intervensi kebijakan untuk menciptakan pekerjaan di kota dengan tingkat upah yang berlaku akan menarik minat lebih banyak pekerja dari desa dan meningkatkan pengangguran di kota (catatan: $W_I < W_F$). Sedangkan, pembangunan desa dan kenaikan upah di sektor perekonomian informal di desa akan mengurangi tingkat pengangguran di kota secara aktual.

Di samping pengertian dari model ini, perbedaan secara regional atau konsentrasi kegiatan ekonomi memiliki dampak besar terhadap mutu dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dan akses pekerja ke pekerjaan produktif. Akibat tingginya biaya sosio-ekonomi dalam perpindahan tenaga kerja secara domestik maupun internasional, tenaga kerja tidak sepenuhnya dinamis (*mobile*). Permodalan manusia di daerah-daerah yang kurang beruntung secara ekonomi mungkin kurang dimanfaatkan, kecuali jika pekerja mau menanggung biaya mobilitas kerja.⁷

Gambar 15:
Tingkat pengangguran menurut area geografis (2005-2010, %)



Sumber: BPS

2.2 Inisiatif untuk mempercepat pertumbuhan regional

Pemerintah Indonesia memiliki visi untuk mengembangkan negara ini menjadi salah satu 10 negara terbaik di dunia tahun 2025 melalui Visi Indonesia 2025. Pemerintah mengungkapkan blok dan strategi pembangunan untuk mewujudkan visi ini melalui Masterplan untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI terdiri dari 3 strategi utama yaitu: (1) pembangunan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi; (2) memperkuat konektivitas nasional; dan (3) memperkuat kapabilitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Masterplan pembangunan regional dan sektoral terpadu ini mempromosikan investasi berskala besar di 22 kegiatan ekonomi prioritas, merevitalisasikan kinerja sektor riil serta mengembangkan pusat-pusat keunggulan di enam koridor ekonomi. Setiap koridor ekonomi difokuskan pada upaya pembangunan untuk kegiatan ekonomi tertentu sesuai keunggulan

⁷ ILO: *Conceptual and Methodological Guide to Employment Diagnostic Analysis* (forthcoming)

(ekonomi) masing-masing (Tabel 11). Pemerintah telah mengidentifikasi total anggaran Rp. 4,012 triliun selama tahun 2014 untuk melaksanakan masterplan ini, yang akan didanai oleh berbagai sumber termasuk anggaran Pemerintah sendiri, BUMN, investasi sektor swasta dan melalui kemitraan publik-swasta (PPP). Pemerintah memperkirakan bahwa efek penciptaan lapangan kerja dari masterplan adalah 9,6 juta pekerjaan baru⁸ antara tahun 2012 hingga 2014.

8 Tifa Asrianti: "MP3EI economic programs 'should include' sustainability", *The Jakarta Post*, 23 November 2011.

Tabel 11:
Tema pembangunan dan kegiatan utama menurut koridor ekonomi

Koridor ekonomi	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Papua-Kep. Maluku
Kegiatan ekonomi yang utama	Pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan cadangan energi nasional	Pendorong industri nasional dan penyediaan layanan	Pusat produksi dan pemrosesan pertambangan nasional dan cadangan energi	Pusat produksi dan pemrosesan nasional pertanian, perkebunan, perikanan, minyak & gas, dan pertambangan	Pintu gerbang pariwisata dan bantuan pangan nasional	Pusat pembangunan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional
Tanaman pangan				*		*
Kakao				*		
Peternakan					*	
Kayu			*			
Perikanan				*	*	*
Nikel				*		*
Tembaga						*
Bauksit			*			
Minyak kelapa sawit	*		*			
Karet	*					
Batu bara	*		*			
Minyak dan Gas			*	*		*
Makanan dan Minuman		*				
Tekstil		*				
Alat Transportasi		*				
Peralatan pertahanan		*				
Baja	*		*			
Perkapalan	*	*				
Pariwisata					*	
ICT		*				
Area pembangunan						
Jabodetabek		*				
Wilayah selat Sunda	*					
Realisasi investasi (Rp. trilyun, 2011)						
Investasi domestik langsung	16.33	37.18	13.47	7.23	0.36	1.44
Investasi asing langsung	18.72	110.88	17.28	6.48	8.55	13.41

Sumber: Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Data tentang realisasi investasi dari BKPM.

Catatan: BKPM mencatat realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan yang mengajukan izin usaha ke BKPM. Data BKPM tentang realisasi investasi tidak termasuk minyak dan gas serta sektor keuangan. Data ini tidak mencakup investasi portofolio; investasi di pasar modal; investasi di mana departemen-departemen teknis mengeluarkan ijin mereka; dan investasi rumah tangga.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi meningkat sebesar Rp. 42,8 triliun dari tahun 2010 hingga 2011, sebagian besar kenaikan ini berasal dari investasi di luar pulau Jawa. Peningkatan investasi di luar pulau Jawa ini merupakan isyarat positif untuk mencapai pertumbuhan yang lebih seimbang secara geografis, namun dominasi pulau Jawa masih besar (sebesar 58,9 persen total realisasi investasi ada di pulau Jawa tahun 2011). BKPM melaporkan bahwa realisasi investasi tahun 2011 merekrut secara langsung 404.039 orang pekerja. Ia memperkirakan penciptaan lapangan kerja secara tak langsung empat kali lipat lebih besar dari dampak langsungnya, jadi ada sekitar 1,6 juta lapangan kerja baru yang tercipta secara tak langsung. Dikarenakan dampak investasi dalam penciptaan lapangan kerja ini, promosi investasi di luar pulau Jawa tampaknya diperlukan agar dapat mewujudkan pertumbuhan yang lebih adil secara geografis di Indonesia.

Pertumbuhan investasi

Gambar 16:
Realisasi investasi (Rp. triliun)



Tabel 12: Realisasi investasi menurut provinsi (Rp. triliun)

Investasi domestik langsung		Investasi asing langsung	
Jawa Barat	11,2	DKI Jakarta	43,2
Jawa Timur	9,7	Jawa Barat	34,2
DKI Jakarta	9,3	Banten	19,8
Riau	7,5	Papua	11,7
Kalimantan Timur	6,6	Jawa Timur	11,7
Lain-lain	31,7	Lain-lain	54,9

Sumber: BKPM

*Lingkungan usaha
yang baik dapat
mempercepat
penciptaan
lapangan kerja
dan pengurangan
kemiskinan*

Investasi skala besar Masterplan ini dan peningkatan volume investasi akan menghasilkan banyak peluang ekonomi di seluruh negeri ini. Merebut peluang ekonomi ini dan menjadikannya pekerjaan produktif bukanlah proses yang bersifat otomatis. Dibutuhkan usaha dari perusahaan, terutama perusahaan formal. Dalam hal ini, pengembangan perusahaan, misalnya, dengan memfasilitasi pembentukan dan ekspansi bisnis atau dengan memperbaiki lingkungan usaha akan meningkatkan dampak Masterplan ini dalam hal pekerjaan.

Pengembangan perusahaan, yang diukur dari densitas perusahaan formal, relatif masih lemah di Indonesia. Jarangnya bisnis formal tampak menonjol di India, Indonesia, dan Vietnam bila dibandingkan beberapa negara pilihan dalam tabel di bawah ini (Tabel 12). Demikian pula, densitas usaha baru juga masih rendah (Tabel 13). Perlu dicatat bahwa insiden kemiskinan sangat tinggi di negara-negara dengan tingkat densitas bisnis formal yang rendah. Data ini menunjukkan bahwa jika perusahaan formal tidak dikembangkan dengan baik, banyak pekerja akan dipaksa terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan produktivitas rendah di sektor perekonomian informal, sehingga kemungkinan besar pekerja dan keluarga mereka hidup dalam kemiskinan. Ada ruang untuk memperbaiki lingkungan bisnis di Indonesia seperti dengan menetapkan peraturan tentang usaha, infrastruktur dan akses ke permodalan.

Tabel 13:
Jumlah bisnis terdaftar per 1.000 warga dan insiden kemiskinan

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Populasi di bawah \$1,25 per hari (%)	Populasi di bawah \$2 per hari (%)
Brasil	26,5	27,7	28,6	29,2	30,5	-	5,2 (2007)	12,7
Hongkong, Cina	55,9	56,4	59,1	62,0	65,9	71,7	-	-
India	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	41,6 (2005)	75,6
Indonesia	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	21,4 (2005)	53,8
Federasi Rusia	12,5	14,1	16,0	17,9	20,3	20,8	0,2 (2005)	1,5
Singapura	20,6	21,0	22,3	23,5	24,1	26,3	-	-
Thailand	3,6	3,6	3,7	3,9	4,1	4,3	0,4 (2005)	11,5
Vietnam	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	-	21,5 (2006)	48,4

Sumber: Bank Dunia, *World Databank*; ILO, KILM Edisi ke 6; kalkulasi penulis

Tabel 14:
Densitas usaha baru (pendaftaran baru per 1.000 penduduk usia 15-64)

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Brasil	1,91	1,94	1,85	2,10	2,40	2,38
Hongkong SAR, China	10,39	12,98	14,64	15,66	18,62	19,19
India	0,05	0,06	0,03	0,07	0,12	--
Indonesia	0,14	0,16	0,16	0,16	0,24	0,18
Malaysia	2,64	2,52	2,51	2,77	2,60	2,55
Federasi Rusia	--	4,95	4,24	4,10	4,22	2,61
Singapura	5,20	5,80	6,29	7,46	7,18	7,40
Thailand	0,70	0,72	0,67	0,55	0,60	0,59

Sumber: Bank Dunia, *World Databank*

‘—’: data tidak tersedia.

2.3 Mengarusutamakan penciptaan lapangan kerja dalam perencanaan pembangunan daerah

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa strategi yang “pro-pertumbuhan, pro masyarakat miskin, pro pekerjaan dan pro lingkungan hidup”, yang menegaskan keyakinan pemerintah untuk mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Menciptakan peluang penghasilan, terutama bagi masyarakat miskin, dengan cara yang berkelanjutan merupakan faktor kunci bagi keberhasilan orientasi kebijakan ini. Dikarenakan struktur tata pemerintahan yang terdesentralisir di Indonesia, kebijakan dan program di tingkat daerah membutuhkan fokus yang kuat terhadap penciptaan pekerjaan produktif dan layak.

Tantangan khusus bagi para pembuat kebijakan dan mitra sosial dalam menciptakan lapangan kerja muncul dari fakta bahwa provinsi-provinsi di Indonesia berada pada berbagai tahap pembangunan dan pengembangan keterampilan, namun modal dan sumber daya alam tidak didistribusikan secara merata antar provinsi/kabupaten. Komposisi industri, kegiatan bisnis, pemanfaatan sumber daya alam, tingkat pendidikan pekerja, infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik dan sebagainya), serta besarnya jarak geografis ke pasar konsumsi adalah sangat berbeda. Akibatnya, indikator penting dari pasar tenaga kerja memperlihatkan kinerja pasar tenaga kerja yang berbeda antar provinsi sebagaimana yang diuraikan dalam bab pertama. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan yang berhasil di suatu provinsi mungkin tidak dapat berfungsi secara efektif di daerah-daerah lain di Indonesia. Dikarenakan masing-masing daerah mempunyai peluang yang berbeda dan menghadapi tantangan yang berbeda pula dalam menciptakan lapangan kerja, masing-masing provinsi perlu merumuskan kebijakan yang cocok dengan

*Merumuskan
kebijakan
ketenagakerjaan
yang sesuai dengan
kondisi sosio-
ekonomis di daerah*

kondisi sosio-ekonomi setempat. Ini membutuhkan analisis menyeluruh tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lapangan kerja, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, serta perumusan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pekerjaan produktif dengan mengatasi hambatan terhadap pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja di provinsi tersebut.

*Analisis diagnostik
ketenagakerjaan
sebagai langkah
pertama untuk
merumuskan
kebijakan
pembangunan
daerah*

ILO telah mengembangkan sarana analitis, analisis diagnostik ketenagakerjaan (EDA) untuk memahami sifat defisiensi dalam pekerjaan produktif dan untuk mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja. EDA membantu pembuat kebijakan dan mitra sosial setempat dalam mengidentifikasi hambatan kritis terhadap pertumbuhan lapangan kerja, yang memperkuat pondasi untuk merumuskan kebijakan. ILO telah memprakarsai EDA di tiga provinsi di Indonesia (NTT, Jawa Timur dan Maluku) bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra sosial.

EDA ILO memadukan kerangka kerja analisis yang dikembangkan secara internasional, keunggulan akademik universitas-universitas di Indonesia, serta pengetahuan lokal. EDA juga didasari pada prinsip bahwa ketimbang meminta analisis dilakukan pakar dari luar, mereka yang bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan harus dilibatkan di semua tahapan analisis ini. Lokakarya tipikal EDA melibatkan upaya untuk mengumpulkan para pemangku kepentingan yang utama, perwakilan bisnis dan pekerja serta pakar akademis) untuk bergabung dalam lokakarya tiga hari guna menganalisis kondisi sosio-ekonomi dan kinerja pasar tenaga kerja di provinsi tersebut secara teratur (Gambar 16). Kendati hambatan terhadap pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja muncul dari berbagai faktor berbeda, namun EDA memungkinkan peserta untuk memilahnya kedalam beberapa faktor penting dengan cara mengombinasikan analisis data terstruktur secara efektif dan pengetahuan lokal yang dibawa oleh pemangku kepentingan. Pendekatan partisipatif ini membantu membentuk pemahaman bersama di antara pemangku kepentingan tentang bidang-bidang yang membutuhkan intervensi kebijakan.

Gambar 17: Pohon diagnostik ketenagakerjaan

Sumber: ILO, *Analisis diagnostik ketenagakerjaan : A methodological guide*

NTT memiliki tingkat kemiskinan dan maltrusi yang tinggi sehingga pada tahapan yang lebih luas, mengakibatkan kurangnya pekerjaan produktif bagi angkatan kerja yang jumlahnya meningkat pesat. Di samping itu, kondisi alam di provinsi ini juga tidak kondusif untuk dijadikan lahan pertanian. Pada tahun 2008, ada sekitar 557 ribu pekerja miskin dari jumlah angkatan kerja sebesar 2,2 juta. Faktor geografis (seperti jumlah penduduk yang tersebar tidak merata di pulau-pulau, transportasi yang kurang memadai, jauh dari pasar konsumen yang utama) serta keterbatasan sumber keuangan dan sumber daya alam semakin mempersulit upaya untuk meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja di provinsi ini.

Akses yang buruk ke pendidikan yang relevan dan bermutu tinggi diidentifikasi sebagai masalah besar, terutama di pedesaan, khususnya bagi anak-anak perempuan. Pasar yang kurang berfungsi dengan baik, akses buruk ke layanan keuangan dan kurangnya mutu lingkungan usaha diidentifikasi sebagai hambatan besar dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang produktif. Memilih teknologi pertanian dan akuakultur yang memadai dan cocok dengan kondisi cuaca kering serta meningkatkan fungsi pasar (yaitu akses ke layanan keuangan, pasar komoditas/petani dan jaringan perdagangan yang efektif) merupakan faktor penting dalam meningkatkan penghasilan dari sektor pertanian. Namun, keterbatasan alam dalam mengembangkan sektor pertanian menegaskan perlunya sektor-sektor non-pertanian untuk memainkan peran yang lebih kuat dan dinamis dalam membangun perekonomian di provinsi ini. Penyediaan layanan-layanan sosial (seperti pendidikan, pelatihan keterampilan dan layanan kesehatan) di luar ibukota membutuhkan adanya intervensi strategis dari dinas-dinas pemerintah daerah agar dapat meningkatkan mutu, kuantitas serta memperbaiki akses ke layanan sosial mendasar.

Untuk provinsi Maluku, mutu sumber daya manusia, pengembalian investasi sosial yang tidak memadai⁹ serta fungsi pasar yang buruk dan kurang berkembang diidentifikasi sebagai hambatan kritis terhadap pertumbuhan yang inklusif dan menghasilkan banyak lapangan kerja di provinsi tersebut. Prestasi pendidikan pekerja di tingkat provinsi umumnya lebih tinggi dari angka rata-rata nasional; namun, relevansi dan mutu pendidikan serta pengembangan keterampilan perlu ditingkatkan dengan memperbaiki hubungan antara sumber daya manusia dengan potensi dan tujuan pembangunan daerah. Pariwisata adalah sektor prioritas di provinsi ini, namun pengembangan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung sektor ini masih lemah. Tingkat pembangunan ekonomi yang rendah dengan penduduk dan kegiatan ekonomi yang tersebar di banyak pulau dalam wilayah geografis yang luas semakin memperlemah dampak investasi. Sementara petani menghadapi minimnya akses ke pasar, keberadaan calo dan mahalnya transportasi antar pulau mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi. Intensifikasi orientasi pasar dan peningkatan nilai tambah dengan memproses hasil pertanian dibutuhkan. Dikarenakan fitur geografis provinsi ini, pendekatan pembangunan berbasis kluster dianjurkan agar dapat meningkatkan efektivitas investasi.

2.4 Pembangunan infrastruktur di desa untuk konektivitas yang lebih baik¹⁰

Konektivitas jalan sebagai basis untuk pembangunan desa dan pengurangan kemiskinan

Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi memainkan peran penting dalam mempromosikan pertumbuhan yang pro masyarakat miskin di daerah pedesaan. Pada faktanya, untuk masyarakat desa, mutu jaringan jalan adalah faktor penting untuk mengakses dan diakses oleh layanan sosio-ekonomi. Sebagai contoh, investasi di bidang prasarana transportasi dapat memiliki dampak positif terhadap penghasilan para petani dan secara substansial dapat mengurangi kemiskinan petani pemilik lahan kecil karena petani tergantung pada transportasi darat untuk mendistribusikan hasil tanaman mereka. Investasi di bidang jaringan transportasi dapat meningkatkan akses ke pasar dan selanjutnya mengurangi biaya transportasi barang. Tanpa konektivitas jalan yang memadai, perjalanan ke pasar dan fasilitas sosial biasanya berlangsung lama dan lamban yang berakibat pada terhambatnya mata pencaharian serta kegiatan lain, hingga dapat mengakibatkan hilangnya penghasilan. Penelitian¹¹ tentang jaringan transportasi di daerah pedesaan di Indonesia menunjukkan bahwa jika mutu jalan desa meningkat, maka penghasilan mereka juga meningkat, terutama

9 Pengembalian investasi secara sosial mengacu pada “kemampuan ekonomi secara keseluruhan untuk mengoptimalkan dampak pembangunan dari investasi (individu) swasta dan pengetahuan dan teknologi yang tertanam dalam investasi tersebut”. Untuk informasi lebih lanjut tentang hasil-hasil EDA, lihat Per Ronnas dan Leyla Shamchiyeva (2011) *Analisa diagnostik ketenagakerjaan: Maluku*, Indonesia, kertas kerja ketenagakerjaan No. 98 (ILO, Geneva)

10 Bagian ini dikontribusikan oleh Emma Allen dan Bas Athmer

11 Yamauchi, F., Muto, M., Chodhury, S., Dewina, R. and Sumaryanto, S. (2009) *Spatial networks, labour supply and income dynamics – Evidence from Indonesian villages*, IFPRI Discussion Paper 00897, International Food Policy Research Institute (Washington D.C.).

keluarga yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa kemunduran jaringan transportasi – akibat kurangnya perawatan atau infrastruktur baru yang mutunya buruk – memiliki dampak negatif terhadap penghasilan keluarga.

Di samping itu, koneksi jalan yang lebih baik dapat meningkatkan akses warga desa ke pendidikan dan layanan kesehatan. Akses ke pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan perekonomian lokal mereka serta mengelola kesehatan masyarakat, sehingga membantu memperbaiki produktivitas dan mata pencaharian. Dalam hal layanan kesehatan, jaringan jalan yang buruk dapat menimbulkan implikasi terhadap waktu dan biaya untuk mengakses layanan, sehingga mempengaruhi mortalitas dan kesehatan persalinan di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, investasi di bidang infrastruktur transportasi melengkapi investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Akses jalan yang lebih baik juga dapat meningkatkan frekuensi kunjungan pekerja penyuluh pertanian ke daerah-daerah terpencil. Maka tidak berlebihan jika peningkatan jaringan jalan desa dapat memiliki dampak besar terhadap produktivitas petani, pembangunan permodalan manusia serta kesejahteraan warga desa. Infrastruktur yang lebih baik kondusif untuk bisnis dan menarik minat investor.¹² Oleh karena itu, peningkatan akses jalan memiliki dampak transformatif terhadap masyarakat desa.

Menerapkan pendekatan berbasis sumber daya lokal untuk konstruksi infrastruktur dapat mencapai tujuan ganda pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, sehingga mengoptimalkan pembangunan perekonomian lokal. Pendekatan berbasis sumber daya lokal mengombinasikan pemakaian tenaga kerja dan peralatan ringan secara optimal untuk memastikan bahwa standar mutu yang dibutuhkan infrastruktur dapat dipertahankan, serta mengoptimalkan potensi untuk menghasilkan pekerjaan lokal. Pendekatan ini dapat digunakan antara lain untuk konstruksi jalan, air bersih serta konservasi lahan, irigasi dan restorasi lahan pertanian.

Penggunaan pendekatan berbasis sumber daya lokal menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan partisipatif. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan investasi infrastruktur untuk memastikan investasi tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal dan masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat dari investasi ini. Pengalaman dari proyek-proyek ILO di Aceh dan Nias menunjukkan bahwa forum masyarakat dapat meningkatkan partisipasi anggota masyarakat, terutama perempuan, dalam pengambilan keputusan, dan akses perempuan ke pekerjaan konstruksi. Menerapkan strategi target juga dapat membantu memastikan investasi menjangkau kelompok sasaran yang diinginkan.

Pendekatan berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja

12 World Food Programme (2011) *Food security and vulnerability atlas of Nusa Tenggara Timur 2010* (Jakarta)

Gambar 18: Pendekatan berbasis sumber daya lokal

Kapasitas pelaksanaan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas

Pengalaman dari proses rekonstruksi Aceh dan Nias mengungkapkan bahwa komponen peningkatan kapasitas dapat meningkatkan mutu aset yang dibangun, serta keterampilan pegawai pemerintah, kontraktor dan pekerja dalam mempertahankan aset tersebut. Ia meningkatkan kemampuan kerja peserta pelatihan dan akses mereka ke peluang yang ada di masa mendatang. Sebagai gambaran, kontraktor skala kecil yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan jalan yang didukung proyek ILO/UNDP berjudul 'Pembangunan Kapasitas Pekerjaan Jalan berbasis Sumber Daya Lokal di sejumlah Kabupaten terpilih di NAD dan Nias' melaporkan adanya manfaat-manfaat seperti keterampilan yang lebih baik dalam proses pengajuan tender, pengelolaan keuangan dan logistik, serta teknik konstruksi dan metode kerja. Ini telah membantu bisnis mereka menjadi lebih menguntungkan dari waktu ke waktu.

Perencanaan yang baik adalah kunci untuk mengoptimalkan dampak investasi infrastruktur dan ketenagakerjaan

Di samping manfaat sosio-ekonomi yang diuraikan di atas, pendekatan berbasis sumber daya lokal dalam pembangunan infrastruktur di desa merupakan pilihan kebijakan yang efektif untuk mengatasi dampak negatif kemunduran ekonomi. Setelah dilanda krisis, investasi di bidang infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja adalah penting dalam merangsang pemulihan perekonomian lokal. Untuk mengoptimalkan hasil, para perencana perlu melakukan investasi di bidang intervensi yang memiliki dampak ganda yang tinggi agar dapat mempercepat proses pemulihan. Investasi di bidang infrastruktur yang mempergunakan metode-metode yang mampu menyerap banyak tenaga kerja adalah pilihan yang tepat karena pendekatan ini akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan jumlah lapangan kerja yang diciptakan secara langsung adalah lima kali lipat lebih besar bila dibandingkan dengan jenis konstruksi lain. Secara umum, perencanaan yang efektif menyediakan peluang untuk investasi publik dalam memainkan kebijakan fiskal yang kontra siklus yang memungkinkan adanya program pekerjaan umum skala besar dan kecil sesuai siklus ekonomi dan stimulus keuangan.

Kendati pendekatan berbasis sumber daya lokal dalam pembangunan infrastruktur menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan dampak

ganda investasi terhadap perekonomian lokal, namun perencanaan dan pelaksanaan proyek yang efektif dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil-hasil sosial. Dalam hal ini, pemerintah daerah dianjurkan untuk mengembangkan beberapa masterplan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur – serta mengalokasikan sumber daya secara tepat – guna memastikan bahwa aset yang diciptakan dapat dipelihara dan investasi tersebut mampu mengatasi masalah yang ada serta memfasilitasi potensi pembangunan lokal.

Di samping itu, perlu diingat bahwa aset infrastruktur perlu dipelihara dan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat terus memperoleh manfaat dari akses yang lebih baik ini. Tanpa pemeliharaan yang tepat, jalan dapat terkikis air hujan, rusak akibat kendaraan yang lalu lalang dan berlubang. Kita perlu mengalokasikan dana untuk pemeliharaan karena pemeliharaan tidak saja menjaga nilai aset, tapi juga memperpanjang usia pakai jalan tersebut. Strategi pembangunan infrastruktur yang mencakup pemeliharaan adalah jauh lebih hemat daripada tanpa pemeliharaan.

2.5. Perpindahan tenaga kerja dan pemakaian remitan secara produktif¹³

Potensi yang relatif belum dimanfaatkan dalam meningkatkan pertumbuhan yang inklusif dan kaya pekerjaan di desa asal pekerja migran adalah pemakaian remitan secara produktif. Remitan yang dikirim pekerja migran tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja migran tapi juga merangsang perekonomian lokal, bila digunakan secara produktif. Mewujudkan siklus migrasi yang produktif adalah sangat terkait dengan daerah tertinggal tempat asal pekerja migran.

Remitan tidak dapat menarik keluarga pekerja migran keluar dari kemiskinan

Pada tahun 2010, lebih dari 575.000 pekerja migran meninggalkan kampung halaman mereka untuk bekerja di luar negeri.¹⁴ Banyak di antara mereka yang berasal dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Dikarenakan banyak pekerja migran yang pergi keluar negeri secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari prosedur rekrutmen yang ketat dan mahal, jumlah keseluruhan pekerja migran di luar negeri diperkirakan jauh lebih banyak dari angka resmi. Masalah keuangan dan kemiskinan akibat kurangnya peluang kerja, dan kemungkinan penghasilan yang lebih tinggi di luar negeri, merupakan faktor pendorong perpindahan tenaga kerja secara terus menerus. Kendati jumlah pekerja migran di luar negeri sudah berkurang secara gradual selama lima tahun terakhir, namun karakteristik kelompok ini masih tetap konsisten. Sekitar 80 persen pekerja migran adalah perempuan, sebagian besar dari mereka bekerja di sektor perekonomian informal yaitu sebagai PRT, dan negara tujuan utama mereka adalah Malaysia dan Saudi Arabia. Sebagian besar pekerja migran berasal

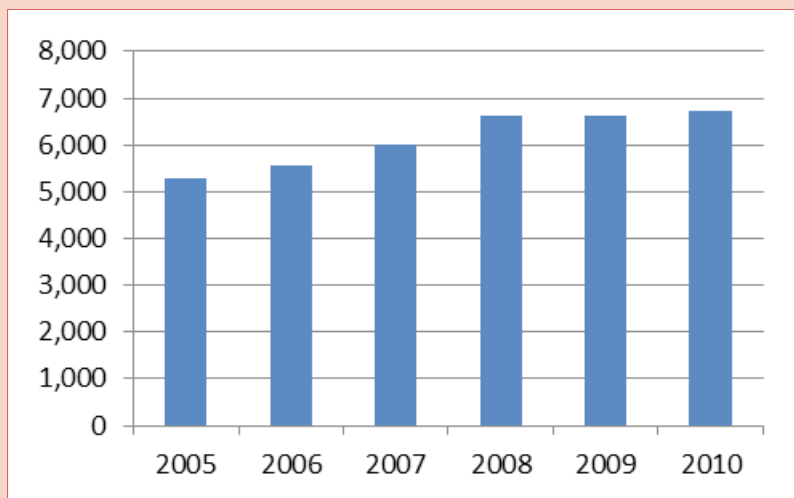
13 Bagian ini disumbangkan oleh Proyek Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan terhadap pekerja migran.

14 Sumber: BNP2TKI

dari keluarga yang kurang beruntung. Sebagian besar pekerja migran juga memiliki latar belakang pendidikan yang buruk, yaitu hanya mengenyam pendidikan dasar. Sebagian bahkan tidak punya latar belakang pendidikan formal atau pelatihan keterampilan.

Kendati pekerja migran di luar negeri terus memberikan kontribusi yang penting untuk perekonomian keluarga melalui remitan – yang berjumlah sekitar 6,7 milyar dolar Amerika tahun 2010¹⁵ - namun keluarga yang menerima remitan internasional tersebut masih tetap miskin. Pada faktanya, 85 persen keluarga pekerja migran tergantung pada remitan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan menutup hutang mereka.¹⁶ Biaya rekrutmen yang secara tidak proporsional sangat tinggi serta pemerasan dalam berbagai tahap migrasi merusak dampak keuangan yang positif dari kepergian mereka untuk mengangkat keluarga keluar dari kemiskinan. Malpraktik ini kadang-kadang menimbulkan lilitan hutang dan membuat keluarga terjerumus dalam kemiskinan. Di samping mengatasi praktik-praktik ini, pendidikan keuangan dan layanan keuangan yang memadai untuk pekerja migran dan keluarga mereka dibutuhkan agar dapat menggunakan remitan secara produktif agar penghasilan dari perpindahan mereka menjadi peluang nyata dan dapat mengangkat mereka keluar dari kemiskinan.

Gambar 19:
Remitan Pekerja migran (dalam juta dolar Amerika, 2010)



Sumber: Bank Indonesia

15 Sumber: Bank Indonesia

16 Laporan survey Proyek ILO tentang upaya untuk Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan terhadap pekerja migran yang tidak dipublikasikan tentang pemakaian remitan.

Tabel 15:
Remitan pekerja migran dari negara tujuan (dalam juta dolar Amerika, 2010)

Malaysia	2.312,2
Saudi Arabia	2.283,9
Taiwan, Provinsi Cina	457,3
Hongkong SAR	450,3
Singapura	226,5
Uni Emirat Arab	196,5
Jepang	152,4
Jordan	102,8
Korea Selatan	91,3
Kuwait	74,8

Sumber: Bank Indonesia

Di samping meningkatkan dampak finansial yang positif dari pekerjaan di luar negeri terhadap upaya pengurangan kemiskinan, mengurangi risiko tindak kekerasan yang terkait dengan perpindahan tenaga kerja merupakan tugas yang mendesak bagi para pembuat kebijakan. Kendati nasib memilukan yang dialami sebagian pekerja migran di luar negeri sudah diketahui secara luas, namun banyak kasus yang mungkin belum dilaporkan, sebagian karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak pekerja migran, kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif serta keterbatasan akses pekerja migran atas keadilan. Kendati jumlah aktual pekerja migran yang menerima tindak kekerasan dan perlakuan keras, termasuk kerja paksa dan perdagangan manusia, masih belum diketahui, namun kasus-kasus yang dilaporkan serta bukti anekdot cukup menjamin upaya lebih lanjut dari otoritas dalam mengatasi kesenjangan dalam peraturan, kebijakan dan program lembaga yang dapat menyediakan secara efektif perlindungan yang dibutuhkan bagi pekerja migran.

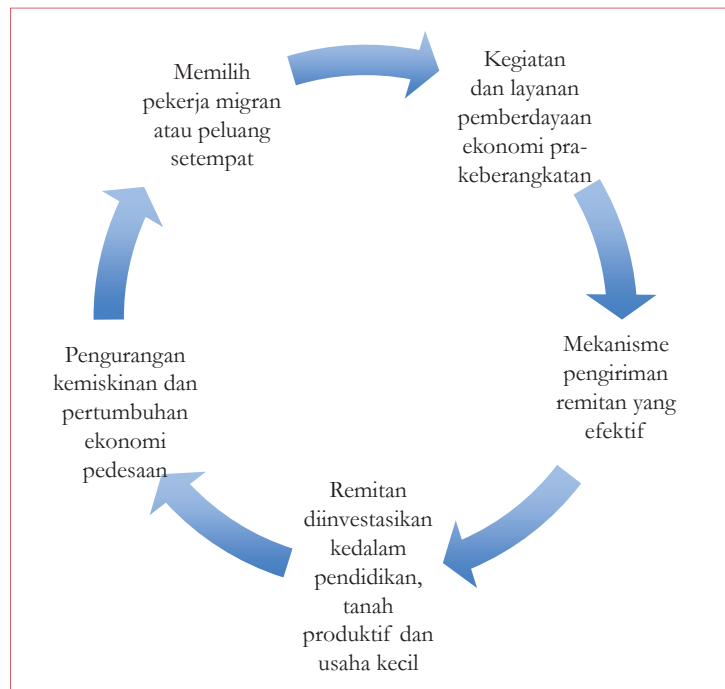
Kebijakan pemerintah saat ini terkait pekerja migran difokuskan pada upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para pekerja migran dan menghentikan tindak kekerasan dan pemerasan yang dilakukan lembaga penyalur tenaga kerja dan calo. *Amandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri dan RUU tentang Pekerja Rumah Tangga adalah peraturan perundangan terkait dengan persoalan ini. Konvensi Internasional tentang perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka, Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak untuk PRT (K189) Rekomendasi tentang PRT (R201) yang melengkapinya menyediakan standar dan praktik yang disepakati secara internasional yang perlu dijadikan panduan untuk menyusun kebijakan dan intervensi lokal di Indonesia. Di samping peraturan ini, perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara tujuan pekerja migran dapat meningkatkan perlindungan pekerja migran yang berada di luar yurisdiksi hukum nasional.*

Mengurangi risiko tindak kekerasan terhadap pekerja migran adalah tugas mendesak

*Mengatasi
kesenjangan dalam
perlindungan
pekerja migran
dan menciptakan
siklus migrasi yang
produktif*

Mengurangi risiko dan kerentanan terhadap eksploitasi pekerja migran dan meningkatkan dampak ekonomi dan ketenagakerjaan dalam hal perpindahan tenaga kerja terhadap keluarga pekerja migran dan masyarakat membutuhkan kebijakan, program dan layanan yang koheren. Pertama-tama, akses anak-anak keluarga miskin di daerah asal atas pendidikan perlu ditingkatkan melalui program-program sosial seperti transfer tunai bersyarat dan beasiswa. Pendidikan dan keterampilan akan meningkatkan kemampuan kerja serta akses ke pekerjaan berupah lebih tinggi di Indonesia maupun luar negeri. Diakui bahwa pekerja migran terampil menghadapi tindak kekerasan yang lebih sedikit dibandingkan pekerja migran yang tidak memiliki keterampilan. Kedua, pelatihan pra keberangkatan perlu melengkapi pekerja migran dengan keterampilan, dan pengetahuan tentang risiko bekerja di luar negeri, hak-hak hukum mereka, dan pendidikan keuangan. Ketiga, layanan keuangan yang sesuai bagi para pekerja migran dan keluarga mereka memainkan peran penting dalam siklus perpindahan yang produktif. Hal ini dikarenakan pekerja migran dan keluarga mereka melakukan berbagai transaksi keuangan selama tahap migrasi mulai dari penerimaan pinjaman untuk membayar biaya rekrutmen dan biaya lain. Mengirim, menerima dan menabung remitan membutuhkan adanya badan keuangan yang layak dan dapat dipercaya. Terakhir namun tak kalah pentingnya, praktik rekrutmen, pemantauan dan penegakan hukum perlu dilengkapi dengan mekanisme penanganan keluhan yang terpercaya, layanan paralegal, dan layanan konseling yang dapat membantu pekerja migran dalam mengakses keadilan di luar negeri bila dibutuhkan.

Gambar 20: Siklus migrasi yang produktif



Upaya ILO dalam pemberdayaan ekonomi difokuskan pada penyediaan bantuan teknis untuk program-program pelatihan. Upaya ini berupaya memberdayakan pekerja migran yang sudah pulang untuk mengambil keputusan finansial yang lebih baik dan mendorong investasi hasil remitan secara produktif. Program-program pelatihan ini yang paling berhasil adalah modul pelatihan Mulai dan kembangkan bisnis Anda (SIYB). Modul pelatihan ini membantu reintegrasi pekerja migran ke tengah masyarakat melalui upaya untuk meningkatkan tabungan remitan, investasi produktif, dan kewirausahaan. Bantuan teknis dari ILO telah mengadakan pelatihan bagi para pelatih dan pemangku kepentingan tentang SIYB seperti pemerintah daerah dan pusat, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat madani termasuk organisasi pekerja migran. Program-program pelatihan ini memperlihatkan keberhasilan besar, di mana sebagian besar peserta pelatihan telah berhasil mendirikan atau meningkatkan bisnis mereka, menemukan sumber penghasilan baru atau alternatif, dan/atau merekrut pekerja tambahan dalam waktu satu tahun setelah program ini diluncurkan.

2.6 Menghapus hambatan gender untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan¹⁷

Bidang lain yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pro masyarakat miskin adalah di bidang permodalan manusia bagi perempuan. Kemajuan besar telah dicapai dalam meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan di Indonesia. Pada faktanya, sejak diberlakukan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan yang ditekankan pada peluang pendidikan yang adil untuk anak laki-laki dan perempuan, tingkat partisipasi dalam pendidikan hampir seimbang di Indonesia. Namun pencapaian luar biasa ini belum diwujudkan secara memadai dalam pasar tenaga kerja dan pekerjaan. Praktik pasar tenaga kerja yang diskriminatif sebagian besar dibentuk oleh ide dan persepsi tentang posisi, status, kapasitas dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam keluarga, tempat dan masyarakat secara umum. Menghapus hambatan-hambatan ini dalam partisipasi tenaga kerja perempuan dan memanfaatkan secara efektif permodalan manusia kaum perempuan adalah tugas penting para pembuat kebijakan dan mitra sosial di Indonesia.

Kemungkinan perempuan melakukan bentuk-bentuk pekerjaan yang berisiko dengan jam kerja yang tidak teratur, upah rendah atau bahkan tanpa upah dan pekerjaan yang tidak aman adalah lebih tinggi dari laki-laki. Ada banyak perempuan Indonesia yang bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa upah. Pada faktanya, sekitar 13,6 juta pekerja perempuan, atau sepertiga

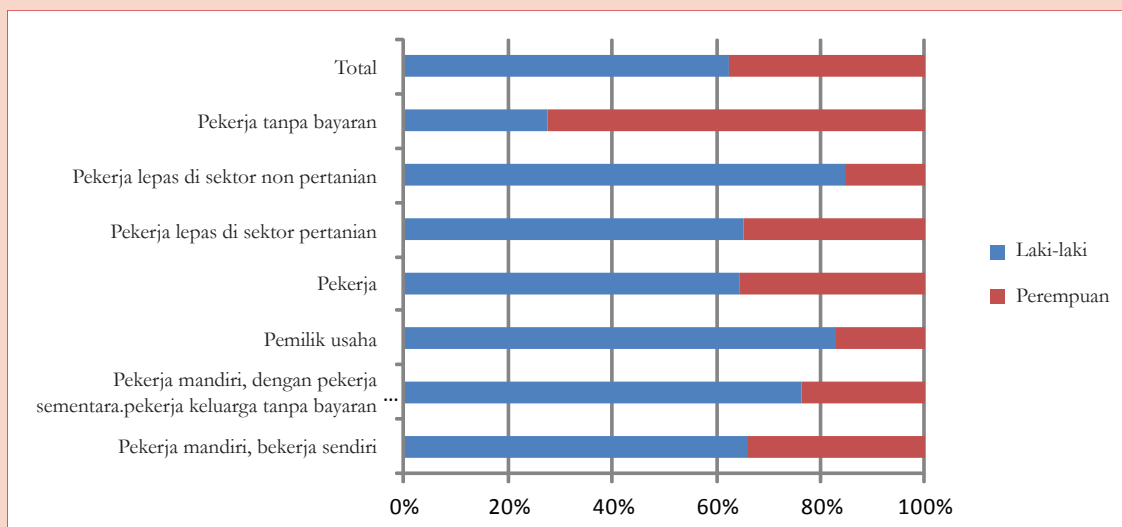
Kesetaraan gender dalam pendidikan belum mampu menembus dunia kerja

Bias gender di pasar tenaga kerja

17 Bagian ini disumbangkan oleh Miranda Fajarman

pekerja perempuan, tidak menerima upah. Di samping itu, kemungkinan perempuan menjadi pengusaha adalah jauh lebih kecil daripada laki-laki.¹⁸ Penelitian terbaru di Indonesia menemukan bahwa perempuan 24 persen lebih mungkin bekerja secara informal dibandingkan laki-laki. Data yang ada menunjukkan bahwa kesenjangan upah antar gender semakin kecil dalam satu dekade terakhir. Namun, kesenjangan upah antar gender masih tetap ada. Diperkirakan bahwa perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang sama seperti laki-laki akan memperoleh upah rata-rata 81 persen dari upah laki-laki.¹⁹

Gambar 21:
Pangsa perempuan dalam pekerjaan menurut status pekerjaan



Sumber: BPS

Tabel 16:
Rincian tenaga kerja menurut gender dan status pekerjaan

	Laki-laki	Perempuan
Pekerja mandiri, bekerja sendiri	20,5	17,6
Pekerja mandiri, dengan pekerja sementara/ pekerja keluarga tanpa bayaran	24,5	12,6
Pemilik usaha	4,0	1,4
Pekerja	31,2	28,2
Pekerja lepas di sektor pertanian	5,6	5,0
Pekerja lepas di sektor non pertanian	6,4	1,9
Pekerja tanpa bayaran	7,7	33,3
Total	100,0	100,0

Sumber: BPS, kalkulasi penulis

18 Bank Duniak, *Indonesia Jobs Report – Towards better jobs and security for all*, (Jakarta) 2010, 63.

19 Bank Dunia, *Gender Equality and Development - Progress in Indonesia*, 2006.

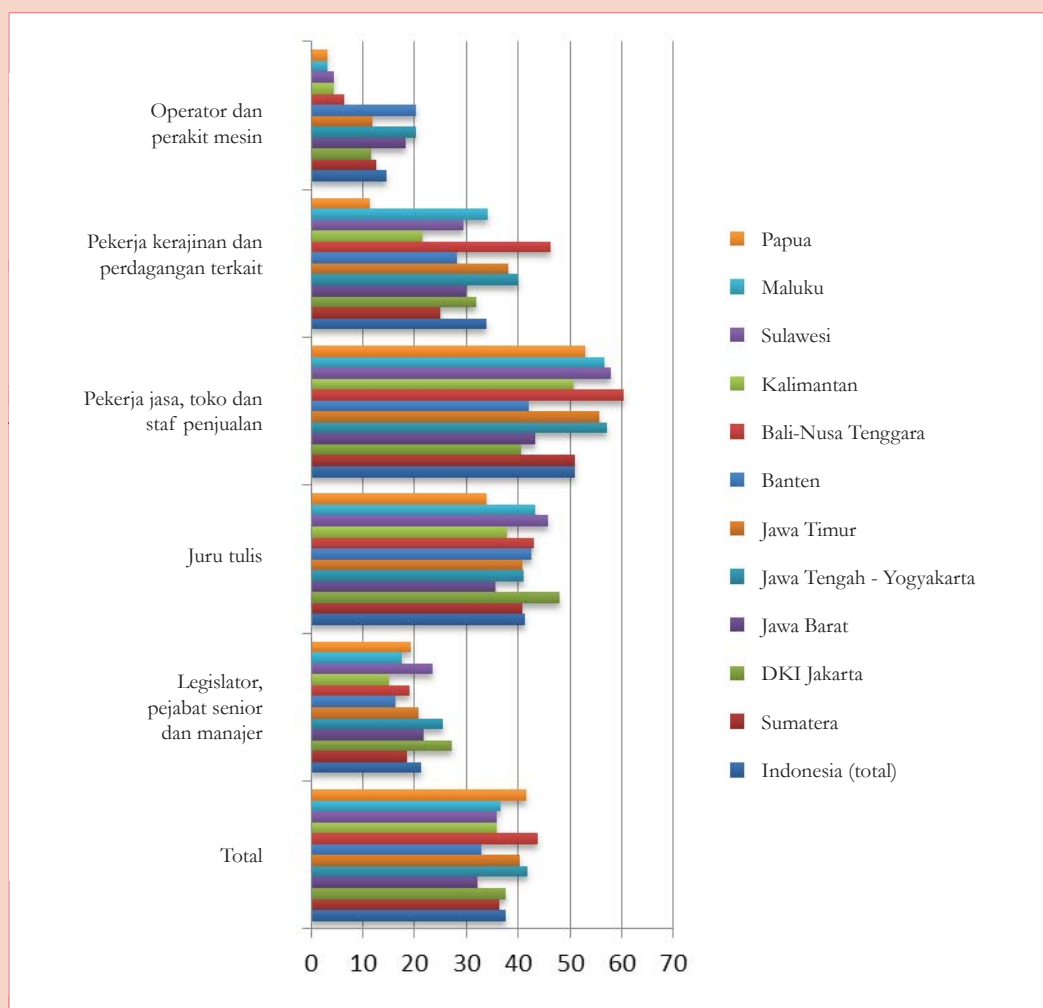
Di Indonesia, perempuan mewakili sekitar 38 persen layanan sipil, tapi lebih dari sepertiga melakukan ‘pekerjaan perempuan yang bersifat tradisional’ seperti mengajar dan mengasuh, yang cenderung memperoleh upah kurang dari pekerjaan yang didominasi laki-laki. Di sektor publik, kemungkinan perempuan memegang posisi senior adalah lebih kecil: hanya 14 persen pegawai negeri dalam posisi tingkat senior.²⁰ Hanya 18 kursi di DPR yang diduduki perempuan kendati sudah ada UU tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan kuota 30 persen untuk kandidat perempuan.

Stereotip gender masih menghantui para aktor pasar tenaga kerja dalam hal jenis pekerjaan yang dianggap cocok untuk pekerja laki-laki dan perempuan serta preferensi langsung bagi perempuan atau laki-laki muda untuk mengisi jabatan tertentu. Hasil dari dinamika ini adalah bahwa perempuan dan laki-laki menyesuaikan diri dan tindakannya. Sebagai contoh, beberapa mata pelajaran dalam sekolah pelatihan kejuruan memperlihatkan pemisahan gender. Mata pelajaran yang biasanya didominasi laki-laki seperti otomotif dan konstruksi masih didominasi pelajar laki-laki. Ruang kelas untuk mata pelajaran perempuan seperti memasak, fesyen atau teknologi domestik sebagian besar diisi pelajar perempuan. Hal yang sama dapat dilihat di universitas, di mana pelajar perempuan terkonsentrasi dalam pendidikan, kedokteran dan kesehatan sementara jumlah pelajar perempuan di fakultas teknik dan hukum masih rendah, yaitu 20 persen dan 34 persen.

Faktor dan praktik yang bertentangan dengan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja

20 Kombinasi laporan berkala keempat dan kelima tentang Konvensi ILO mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Indonesia, (20 Juni 2005) UN Doc CEDAW/C/IDN/4-5.

Gambar 22:
Pemisahan pekerjaan menurut jenis kelamin (usia 15+, persen, 2010)



Kendati konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi pekerja perempuan secara adil bervariasi dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia, ada beberapa hambatan umum yang dihadapi perempuan di negeri ini. Hambatan ini mencakup peran domestik dan tanggung jawab perempuan, status bawahan perempuan dalam hal hubungan gender, dan sikap patriarkal terhadap partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi, publik dan politik. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi ini, serta dukungan yang tidak memadai di rumah untuk mengasuh anak dan mengatur rumah tangga, mempengaruhi keputusan perempuan untuk memasuki dunia kerja, khususnya dalam memasuki sektor-sektor non-tradisional. Di samping itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa 154 RUU daerah secara sengaja atau pada pelaksanaannya mendiskriminasi perempuan.²¹ Sebagian dari RUU ini memberlakukan tata tertib berpakaian, yang dapat menimbulkan diskriminasi di tempat kerja atau penolakan akses bagi beberapa kelompok pekerja perempuan ke pekerjaan umum di beberapa bidang tertentu (lihat Kotak 2).

²¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (2010) *Atas nama otonomi daerah: Institutionalisation of discrimination in Indonesia*, Laporan pemantauan oleh Komnas Perempuan tentang status hak-hak konstitusional perempuan di 16 Kabupaten/Kotamadya di 7 Provinsi (Jakarta).

Kotak 2

**Pandangan Komisi Ahli ILO mengenai Penerapan
Konvensi dan Rekomendasi (CEACR) menyangkut tata tertib
berpakaian dan diskriminasi**

Untuk kasus **Perancis**, CEACR menyatakan kekhawatirannya bahwa larangan pemakaian simbol atau pakaian keagamaan, termasuk jilbab, di sekolah-sekolah umum yang diterapkan UU No. 65 tanggal 17 Maret 2004 dan edaran pelaksanaannya tanggal 18 Mei 2004 pada praktiknya mungkin membuat sebagian anak-anak, terutama anak perempuan, tidak dapat bersekolah di sekolah umum karena alasan yang terkait dengan keyakinan agama mereka. Ini akan mengurangi kapasitas mereka dalam mencari pekerjaan dan bertentangan dengan Konvensi ILO tentang Diskriminasi dalam hal Pekerjaan dan Jabatan (K111).

Untuk kasus **Turki**, CEACR menyatakan kekhawatirannya bahwa kewajiban pegawai negeri dan pelajar untuk tidak menutup kepala mereka akan mempengaruhi perempuan muslim secara tidak proporsional, sehingga mungkin menghambat atau menghalangi hak mereka dalam memperoleh akses yang adil ke pendidikan dan pekerjaan akibat praktik keagamaan mereka.

Untuk kasus **Republik Islam Iran**, CEACR menyatakan kekhawatirannya terkait tata tertib berpakaian wajib bagi perempuan, termasuk menggunakan jilbab, dan penerapan sanksi sesuai UU tentang pelanggaran administratif atas pelanggaran Peraturan. CEACR sangat khawatir tentang “dampak negatif yang dimiliki peraturan tersebut terhadap pekerjaan perempuan non-Islam di sektor publik.”

Sumber:

“Observasi individu tentang Konvensi No. 111 yang berhubungan dengan Perancis,” dalam *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*, Laporan III (Bagian 1A), Konferensi Perburuhan Internasional, sidang ke-93, Geneva, 2005; sidang ke-95, Geneva, 2006; dan sidang ke-97, Geneva, 2008.

“Observasi individu tentang Konvensi No. 111 yang berhubungan dengan Turki,” dalam *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*, Laporan III (Bagian 1A), Konferensi Perburuhan Internasional, sidang ke-89, Geneva, 2001; sidang ke-91, Geneva, 2003; sidang ke-95, Geneva, 2006.

“Observasi individu tentang Konvensi No. 111 yang berhubungan dengan Republik Islam Iran,” dalam *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*, Laporan III (Bagian 1A), Konferensi Perburuhan Internasional, sidang ke-95, Geneva, 2006 (Geneva).

Di samping faktor-faktor sosio-kultural yang menghambat perempuan dalam berpartisipasi secara penuh dan adil dalam pekerjaan, malpraktik yang luas terhadap perempuan di tempat kerja juga mendiskriminasi perempuan sebagian karena tanggung jawab mereka untuk mengasuh dan merawat anak. Menurut penelitian²² yang diadakan di beberapa perusahaan formal namun tidak punya serikat pekerja, sekitar 18 persen tempat kerja mempertimbangkan status pernikahan pelamar kerja saat rekrutmen.

22 American Center for International Labour Solidarity (2010) *Core labor rights in Indonesia 2010: A survey of violations in the formal sector*, Jakarta.

*Kerangka hukum
anti-diskriminasi
yang efektif
dibutuhkan*

Ditemukan juga bahwa 11 persen tempat kerja memecat perempuan karena hamil. Alasan utama pemilikusaha mempekerjakan banyak perempuan sebagai pekerja harian agar tidak termasuk dalam ketentuan yang mengharuskan pembayaran tunjangan dan cuti persalinan.²³

Ada fokus yang kuat tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan nasional untuk mencoba mengatasi tantangan kesetaraan. Menghapus diskriminasi juga merupakan salah satu visi Kabinet Bersatu Indonesia.²⁴ Kebijakan dan inisiatif nasional untuk memperkuat pengarusutamaan gender adalah sangat penting, namun pengembangan kebijakan untuk akses perempuan ke pekerjaan perlu diberi prioritas yang lebih besar dan dilaksanakan di samping prioritas dan strategi nasional untuk mengatasi tindak kekerasan berbasis gender dan akses adil bagi perempuan dalam memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan.

Tampaknya dibutuhkan kerangka hukum yang efektif untuk melindungi dari diskriminasi atas dasar gender dan untuk mempromosikan kesetaraan substantif melalui program tindakan afirmatif yang ditargetkan untuk partisipasi perempuan dalam pekerjaan agar dapat mengatasi masalah akses yang tidak adil bagi perempuan ke pekerjaan dan perlakuan di tempat kerja. Kesenjangan dalam UU nasional, terutama yang terkait dengan kurangnya peraturan yang melarang pelecehan seksual di tempat kerja dan kurangnya UU ketenagakerjaan yang mengatur tentang hubungan kerja PRT juga memiliki dampak besar terhadap mutu pekerjaan bagi perempuan di Indonesia.

2.7 Hak-hak pekerja dan dialog sosial

Menciptakan kondisi kerja yang adil dan menyediakan pekerja dan keluarga mereka kehidupan yang layak adalah tujuan utama dari kebijakan pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Ini sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena tingkat ketergantungan ekonomi negeri ini yang tinggi terhadap konsumsi swasta. Pada faktanya, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh antara tahun 2000 hingga 2009 yang jauh lebih besar dari apa yang telah dilakukan investasi.²⁵ Untuk menekankan pentingnya konsumsi rumah tangga, kita dapat mengingat kembali bahwa konsumsi domestik yang

23 Organisasi Perburuhan Internasional 'Observasi individu mengenai Konvensi ILO no. 100 tahun 1961 tentang Upah yang Adil yang berhubungan dengan Indonesia', dalam *Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations*, Laporan III (Bagian 1A), Konferensi Perburuhan Internasional, sidang ke-93, (Geneva) 2004.

24 Kombinasi laporan berkala keenam dan ketujuh tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Indonesia, (14 Oktober 2010) UN Doc CEDAW/C/IDN/6-7 para 7.

25 ILO (2011) *Tren sosial dan ketenagakerjaan di Indonesia 2010* (Jakarta).

kuat telah membantu Indonesia mengatasi dampak negatif krisis keuangan global. Secara keseluruhan, terbukti bahwa menjamin kondisi kerja yang baik meningkatkan konsumsi domestik yang berkelanjutan, seraya mengurangi kerentanan ekonomi secara eksternal, dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Dekade terakhir menunjukkan peningkatan besar dalam hal pengakuan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Setelah jatuhnya rezim Suharto, Indonesia segera meratifikasi semua Konvensi Pokok ILO dan menetapkan hak-hak utama pekerja. Indonesia adalah salah satu negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang telah meratifikasi semua konvensi pokok. Sebagai hasil dari kebebasan berserikat yang baru-baru ini diakui, jumlah serikat pekerja meningkat drastis dalam satu dekade terakhir. Pemerintah juga mempromosikan organisasi bipartit di tingkat perusahaan/pabrik agar dapat memperkuat dialog sosial antara manajemen dengan pekerja karena solusi hasil negosiasi menyediakan alternatif yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik. Di samping itu, dialog sosial juga dikenal atas dampak positifnya terhadap produktivitas dari pengalaman sebelumnya di berbagai negara industri.

Tabel 17:
Ratifikasi Konvensi Pokok ILO (Negara-negara anggota ASEAN)

	K29 (kerja paksa)	K87 (kebebasan berserikat)	K98 (perundingan bersama)	K100 (upah yang adil)	K105 (penghapusan kerja paksa)	K111 (diskriminasi pekerjaan dan jabatan)	K138 (upah minimum)	K182 (bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak)
Brunei Darussalam							Ya	Ya
Kamboja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Indonesia	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Laos	Ya			Ya		Ya	Ya	Ya
Malaysia	Ya		Ya	Ya	Dilaporkan		Ya	Ya
Myanmar	Ya	Ya						
Filipina	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Singapura	Ya		Ya	Ya	Dilaporkan		Ya	Ya
Thailand	Ya			Ya	Ya		Ya	Ya
Vietnam	Ya			Ya		Ya	Ya	Ya

Sumber: ILO, *Database of International Labour Standards (ILOLEX)* (diakses tanggal 19 Desember 2011)

Meskipun demikian, ada banyak ruang untuk melakukan perbaikan dalam menjamin hak-hak pekerja dan memperkuat dialog sosial di Indonesia. Pada faktanya, pelanggaran atas hak-hak pekerja tidak jarang terjadi bahkan di perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja di sektor perekonomian formal.²⁶ Kendati hak-hak utama pekerja telah diatur dalam UU, namun pelanggaran masih terjadi karena sejarah kebebasan berserikat di Indonesia masih singkat dan praktik terbaik dalam hubungan industri kini masih dikembangkan, dan Pengadilan Hubungan Industrial masih memerlukan peningkatan kapasitas lebih lanjut agar dapat menyelesaikan konflik antara pengusaha dengan pekerja secara efektif. Dampak perundingan bersama dalam meningkatkan kondisi kerja, misalnya, masih dalam tahap baru lahir: 91 persen tempat kerja yang disurvei sudah punya kesepakatan kerja bersama, namun 47 persen dari kesepakatan tersebut hanya replikasi dari kekurangan hak-hak pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang berlaku, menurut laporan tersebut. Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat, tapi dibutuhkan waktu bertahun-tahun dan jumlah negosiasi yang besar sebelum pekerja dan pengusaha dapat membangun rasa saling percaya dan mengembangkan keterampilan untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah ketenagakerjaan yang kontroversial.

Laporan dari American Center for International Labour Solidarity (ACILS) mencatat beberapa kasus pelanggaran hak-hak pekerja berdasarkan diskusi kelompok fokus, wawancara dan survei terhadap 658 pimpinan serikat pekerja.²⁷ Hampir separuh kasus yang tercatat terkait dengan pemecatan dan sepertiga kasus tentang kebebasan berserikat. Menurut laporan ini, diskriminasi atas dasar usia (misalnya pengusaha hanya merekrut pekerja yang berusia di bawah umur tertentu) tampak banyak terjadi karena 63 persen pimpinan serikat pekerja yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka melihat praktik ini terjadi di tempat kerja mereka. Pemakaian jasa *outsourcing* secara sewenang-wenang adalah bentuk pelanggaran lain yang umum terjadi terhadap UU Ketenagakerjaan Tahun 2003. Sekitar 48 persen responden melihat pekerja *outsourcing* melakukan tugas-tugas utama, yang dilarang UU ini. Beberapa pengusaha dilaporkan mengambil langkah-langkah anti-serikat pekerja dengan melakukan misalnya intimidasi dan balas dendam terhadap pimpinan serikat pekerja atau pelaku pemogokan²⁸ dalam merespons tindakan bersama pekerja secara sah. Gambaran tentang ketidakpatuhan terhadap UU ini memprihatinkan karena survei ini dilakukan di perusahaan-perusahaan formal di mana ada perwakilan serikat pekerja. Tingkat ketidakpatuhan terhadap UU ini diperkirakan lebih banyak jumlahnya di tempat kerja dan perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja.

26 American Center for International Labour Solidarity (2010) *Core labor rights in Indonesia 2010: A survey of violations in the formal sector*, Jakarta.

27 *ibid.*

28 Laporan ini didasari pada: a) diskusi kelompok fokus dan wawancara mendalam dengan 250 pimpinan serikat pekerja yang utama dan pengawas tenaga kerja, dan polisi di tingkat nasional dan di 20 pusat industri; serta b) survei yang melibatkan 658 pimpinan serikat pekerja di 20 lokasi yang sama yang diadakan oleh seorang pengumpul suara (*pollster*) profesional.

Tabel 18:
Jumlah pelanggaran atas hak-hak pekerja menurut jenis (%)

Jenis pelanggaran	Pangsa (%)
Pemecatan	49,5
Kebebasan berserikat	31,8
di mana:	
- menolak mengakui serikat pekerja	5,5
- memecat pimpinan serikat pekerja	20,4
- tindak kriminal	3,6
- kasus lain	2,3
Perselisihan kontrak/status	11,7
Upah minimum	6,0
Perundingan bersama	5,1
<i>Outsourcing</i>	3,6
Cakupan jaminan sosial (Jamsostek)	3,0
Hak-hak perempuan	0,9

Sumber: American Center for International Labour Solidarity

Catatan: Beberapa kasus melibatkan tindak pelanggaran ganda

Ekspansi ekonomi secara cepat biasanya menyebabkan adanya transformasi sosial yang besar. Perlu juga disebutkan bahwa lembaga sosial yang sesuai untuk perekonomian mata pencaharian berbasis pertanian dan perekonomian yang intensif modal atau berbasis pengetahuan adalah sangat berbeda. Apabila peralihan dari perekonomian yang intensif modal menjadi perekonomian berbasis pengetahuan dilakukan dalam jangka waktu relatif singkat, maka negeri ini membutuhkannya adanya transformasi sosial secara cepat. Apabila penyesuaian sosial masih di belakang pembangunan ekonomi, maka berbagai masalah sosial mungkin akan muncul. Sebagai contoh, kombinasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan akses yang tidak merata ke pekerjaan layak kemungkinan besar akan memperbesar kesenjangan penghasilan. Ketidaksetaraan penghasilan yang luas akan menghambat kohesi sosial, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial seperti tindak kriminal dan kemiskinan. Di samping itu, tekanan inflasi yang tinggi biasanya merupakan produk samping dari ekspansi ekonomi cepat karena kegiatan ekonomi yang dipercepat akan meningkatkan kebutuhan akan uang. Apabila kenaikan upah di bawah inflasi, maka daya beli yang lemah dari pekerja akan membuat mereka semakin miskin, dan dapat menimbulkan ketidaktentraman industri. Ekspansi sektor jasa secara cepat, sebagai contoh lain, akan mengubah permintaan keterampilan di pasar tenaga kerja, sehingga dapat memicu kenaikan upah untuk jenis pekerjaan tertentu apabila sistem pendidikan dan latihan kerja gagal menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan keterampilan di pasar tenaga kerja.

29 Laporan ini mencatat kejadian kriminal secara sporadis terhadap pimpinan serikat pekerja serta ancaman atau pemecatan secara aktual terhadap para pimpinan serikat pekerja.

Respons kebijakan yang cepat dan menyesuaikan lembaga sosial yang ada terhadap pembangunan ekonomi yang mengalami perubahan ini sangat diperlukan. Kegagalan lembaga sosial dalam melakukan penyesuaian terhadap pembangunan ekonomi kadang-kadang dapat menimbulkan kerusuhan sosial termasuk konflik perburuhan sebagaimana yang dialami negara-negara industri di masa lalu. Menurut sejarah, ada banyak kasus yang melibatkan ketidakadilan sosial termasuk gerakan politik yang dimotivasi oleh ketidaksetaraan. Dialog sosial adalah intervensi sosial di mana masalah ketenagakerjaan yang muncul dibahas secara damai dan solusi yang tepat dinegosiasikan oleh para pihak terkait. Indonesia diperkirakan akan mengalami pembangunan ekonomi yang tinggi selama beberapa tahun mendatang. Apakah negeri ini mampu mentransformasikan lembaga sosialnya secara berhasil atau tidak tergantung sebagian pada kedewasaan dialog sosial dan kapasitas pemerintah serta mitra sosial dalam mencari solusi melalui negosiasi atas persoalan-persoalan yang muncul.

Lampiran I BPS: disagregasi pekerjaan dalam perekonomian formal dan informal

Status pekerjaan	Pekerjaan utama									
	Pekerja profesional, teknis dan pekerja terkait	Pekerja administratif dan manajerial	Juru tulis dan pekerja terkait	Staf penjualan	Pekerja layanan	Pekerja industri pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan pemburu	Pekerja bagian produksi dan pekerjaan terkait	Pekerja transportasi dan operator alat	Buruh	Lain-lain
Pekerja mandiri, bekerja sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja mandiri, dibantu pekerja sementara/ tanpa upah	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Pemilik usaha	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja lepas di sektor pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja lepas di sektor non pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja tanpa upah	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Sumber: BPS Catatan: F berarti formal dan INF berarti informal										

Lampiran II. Lampiran Statistik

Tabel II.1. Indikator pasar kerja 2004–2010

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tingkat partisipasi angkatan kerja (15-64, persen)							
Total	69,1	68,6	68,1	68,9	69,3	69,2	69,8
Laki-laki	87,7	86,8	86,2	85,6	85,5	85,6	85,8
Perempuan	50,6	50,0	49,8	52,1	53,1	52,9	53,7
Rasio tenaga kerja-penduduk (15-64, persen)							
Total	62,3	60,8	60,9	62,4	63,2	63,6	64,7
Laki-laki	80,5	78,6	78,7	78,4	78,7	78,9	80,3
Perempuan	44,1	42,6	43,0	46,3	47,7	48,2	49,0
Tingkat pengangguran (15+, persen)							
Total	9,9	11,2	10,3	9,1	8,4	7,9	7,1
Laki-laki	8,1	9,3	8,5	8,1	7,6	7,5	6,1
Perempuan	12,9	14,7	13,4	10,8	9,7	8,5	8,7
Pekerja informal (umur 15+, persen)							
Total	63,2	63,2	62,8	62,1	61,3	61,6	59,0
Laki-laki	60,5	61,4	61,4	59,9	59,3	60,1	57,2
Perempuan	68,2	66,6	65,4	65,9	64,5	64,0	61,8
Tingkat pengangguran (persen)							
Total	14,3	14,8	14,4	14,9	14,5	14,7	14,1
Laki-laki	12,8	13,5	13,4	13,4	13,4	13,4	12,8
Perempuan	17,1	17,2	16,4	17,5	16,4	16,8	16,2

Catatan: Setengah pengangguran yang terkait waktu mengacu pada pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan sedang mencari pekerjaan atau bersedia melakukan pekerjaan lebih.

Sumber: BPS Sakernas.

Tabel II.2. Indikator pasar kerja muda (15-24) 2004-2010

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)							
Total	54,1	52,8	52,9	52,3	50,9	50,3	49,1
Laki-laki	64,2	62,2	61,7	62,8	60,1	60,0	58,2
Perempuan	44,0	43,4	43,6	41,3	41,4	40,4	39,9
Rasio tenaga kerja-penduduk (persen)							
Total	38,1	35,1	36,7	39,1	39,0	39,2	38,6
Laki-laki	46,9	43,5	44,5	47,9	47,0	47,0	45,9
Perempuan	29,3	26,8	28,5	30,0	30,8	31,1	31,1
Tingkat pengangguran (persen)							
Total	29,6	33,4	30,6	25,1	23,3	22,2	21,4
Laki-laki	26,9	30,1	27,8	23,8	21,8	21,6	21,1
Perempuan	33,5	38,2	34,7	27,3	25,5	23,0	22,0
Kaum muda yang tidak dalam pendidikan dan tidak bekerja (persen)							
Total	15,7	17,3	15,8	12,9	11,5	10,8	10,2
Laki-laki	17,0	18,4	16,8	14,6	12,7	12,7	12,1
Perempuan	14,4	16,2	14,8	11,1	10,2	8,9	8,4

Sumber: BPS Sakernas.

Tabel II.3. Status ketenagakerjaan (usia 15+, % distribusi) 2004–2010

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pekerja mandiri	19,5	18,4	20,4	20,3	20,4	20,1	19,4
Pemilik usaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar	23,0	22,3	20,9	21,0	21,2	20,9	20,0
Pemilik usaha, dengan pegawai tetap	3,2	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	3,0
Pemilik usaha	27,2	27,7	28,1	28,1	27,5	27,8	30,1
Pekerja lepas di sektor pertanian	4,7	5,9	5,8	5,9	5,8	5,6	5,4
Pekerja lepas di sektor non-pertanian	4,0	4,6	4,8	4,5	5,2	5,4	4,7
Pekerja tanpa bayaran	18,5	18,0	16,9	17,3	16,9	17,3	17,3
Laki-laki	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pekerja mandiri	21,2	20,1	21,9	21,5	21,2	21,1	20,5
Pengusaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar	27,9	27,5	25,3	25,2	25,4	25,2	24,5
Pengusaha, dengan pegawai tetap	4,3	4,0	4,0	3,8	3,9	3,9	4,0
Pengusaha	29,1	28,8	28,9	29,9	28,9	28,6	31,2
Pekerja di sektor pertanian	4,7	5,9	6,0	6,0	6,0	5,7	5,6
Pekerja di sektor non-pertanian	5,3	5,9	6,2	5,9	6,8	7,3	6,4
Pekerja tanpa bayaran	7,5	7,7	7,7	7,8	7,8	8,1	7,7
Perempuan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pekerja mandiri	16,5	15,2	17,8	18,4	19,1	18,3	17,6
Pengusaha, dengan pegawai sementara/tidak dibayar	13,9	12,6	12,8	14,0	14,3	13,8	12,6
Pengusaha, dengan pegawai tetap	1,1	1,2	1,1	1,4	1,4	1,3	1,4
Pengusaha	23,6	25,6	26,5	24,8	25,1	26,4	28,2
Pekerja di sektor pertanian	4,9	5,8	5,4	5,8	5,6	5,4	5,0
Pekerja di sektor non-pertanian	1,5	2,1	2,2	2,0	2,4	2,4	1,9
Pekerja tanpa bayaran	38,5	37,5	34,1	33,6	32,1	32,4	33,3

Sumber: BPS Sakernas.

Tabel II. 4 Pekerjaan berdasarkan sektor (% distribusi) 2004–2010

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total							
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	43,3	44,0	42,0	41,2	40,3	39,7	38,3
Pertambangan	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
Industri manufaktur	11,8	12,7	12,5	12,4	12,2	12,2	12,8
Listrik, gas dan air	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Konstruksi	4,8	4,9	4,9	5,3	5,3	5,2	5,2
Perdagangan umum, ritel, restoran dan hotel	20,4	19,1	20,1	20,6	20,7	20,9	20,8
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	5,8	6,0	5,9	6,0	6,0	5,8	5,2
Keuangan, asuransi, real estat, layanan bisnis	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6
Komunitas, sosial dan layanan personal	11,2	11,0	11,9	12,0	12,8	13,4	14,7
Laki-laki							
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	42,6	43,8	42,5	41,1	40,6	40,2	38,8
Pertambangan	1,4	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6
Industri manufaktur	11,0	11,4	11,3	11,3	11,2	11,1	11,6
Listrik, gas dan air	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Konstruksi	7,3	7,3	7,4	8,1	8,3	8,2	8,1
Perdagangan umum, ritel, restoran dan hotel	16,9	15,8	16,7	16,4	16,5	16,5	16,9
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	8,7	8,9	8,7	8,8	8,6	8,5	7,6
Keuangan, asuransi, real estat, layanan bisnis	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,8
Komunitas, sosial dan layanan personal	10,3	9,9	10,2	11,0	11,6	12,0	13,2
Perempuan							
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	44,6	44,3	41,1	41,4	39,9	38,8	37,6
Pertambangan	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
Industri manufaktur	13,3	15,1	14,6	14,3	14,0	14,1	14,7
Listrik, gas dan air	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Konstruksi	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Perdagangan umum, ritel, restoran dan hotel	26,8	25,2	26,5	27,7	27,7	28,2	27,2
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	0,6	0,5	0,9	1,0	1,8	1,5	1,2
Keuangan, asuransi, real estat, layanan bisnis	0,8	0,9	1,2	1,1	1,1	1,1	1,3
Komunitas, sosial dan layanan personal	12,9	13,1	15,0	13,8	14,7	15,6	17,3

Sumber: BPS Sakernas.

Indikator-indikator latar belakang

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan Domestik Bruto (PDB, tingkat pertumbuhan tahunan, %) <i>Sumber: Bank Dunia, World DataBank</i>	5,0	5,7	5,5	6,3	6,0	4,6	6,1
PDB per kapita (tetap 2000 US\$) <i>Sumber: Bank Dunia, World DataBank</i>	875,7	914,6	953,9	1,003,40	1,052,40	1,089,20	1,143,80
GDP per kapita, <i>purchasing power parity</i> (PPP) (constant 2005 international \$) <i>Sumber: Bank Dunia, World DataBank</i>	2,970	3,102	3,236	3,403	3,570	3,694	3,880
Jumlah kaum miskin (juta, definisi nasional) Persentasi kaum miskin	36,1 16,7	35,1 16,0	39,3 17,8	37,2 16,6	35,0 15,4	32,5 14,2	31,0 13,3

